

GOOD CORPORATE GOVERNANCE REPORT

# 2013

LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN  
PT BANK ANZ INDONESIA





# TABLE OF CONTENTS

## Daftar Isi

I.	PENDAHULUAN / INTRODUCTION	4
II.	TRANSPARANSI / TRANSPARENCY	6
A.	Pengungkapan Pelaksanaan Good Corporate Governance yang meliputi 7 (tujuh) aspek cakupan Good Corporate Governance	
	<i>Disclosure of Good Corporate Governance Implementation comprising of 7 (seven) aspects of Good Corporate Governance</i>	6
1.	Pelaksanaan Tugas dari Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi	
	<i>The Implementation of Duties and Responsibility of Board of Commissioners and Board of Directors</i>	6
2.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite	
	<i>Completeness and Implementation of the Tasks of Committees</i>	11
3.	Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Internal, dan Audit Eksternal	
	<i>The Implementation of Compliance, Internal Audit and External Audit Functions</i>	14
4.	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Internal	
	<i>The Implementation of Risk Management including Internal Control System</i>	20
5.	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar	
	<i>Lending Exposure to Related Party and Large Lending Exposure</i>	33
6.	Rencana Strategik Bank	
	<i>Bank's Strategic Plan</i>	34
7.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang belum Diungkap dalam Laporan Lainnya	
	<i>The Transparency of Bank's Financial and Non-Financial Condition that have not been Defined in Other Reports</i>	36
B.	Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi	
	<i>Shared Ownership by Members of Board of Commissioners and Board of Directors</i>	38
C.	Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris Lainnya, Dewan Direksi Lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank	
	<i>Financial and Family Relationship among Members of Board of Commissioners and Board of Directors with Other Member and/or with Controlling Shareholders</i>	39
D.	Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi	
	<i>Remuneration and Other Facilities Package/Policy for Board of Commissioners and Board of Directors</i>	39

<b>E. Opsi Saham</b>	
<i>Shares Option</i>	40
<b>F. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah</b>	
<i>The Highest and Lowest Salary Ratios</i>	40
<b>G. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris</b>	
<i>The Frequency of Board of Commissioners Meeting</i>	40
<b>H. Jumlah penyimpangan Internal (<i>internal fraud</i>)</b>	
<i>The Number of Internal Fraud</i>	41
<b>I. Permasalahan Hukum</b>	
<i>Legal Issue</i>	41
<b>J. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan</b>	
<i>Transaction that Contains Conflict of Interest</i>	42
<b>K. <i>Buyback</i> Saham dan <i>Buyback</i> Obligasi Bank</b>	
<i>Share Buy Back and Buy Back of Bank's Bond</i>	42
<b>L. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik Selama Periode Pelaporan</b>	
<i>Fund Granting for Social and Political Activities during Reporting Period</i>	42
<b>III. AKUNTABILITAS</b>	
<i>ACCOUNTABILITY</i>	44
<b>IV. PERTANGGUNGJAWABAN</b>	
<i>RESPONSIBILITY</i>	46
<b>V. INDEPENDENSI</b>	
<i>INDEPENDENCE</i>	46
<b>VI. KEWAJARAN</b>	
<i>FAIRNESS</i>	50
<b>VII. HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BANK</b>	
<i>SELF ASSESSMENT RESULT ON THE BANK'S GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION</i>	51
<b>VIII. PENUTUP</b>	
<i>CONCLUSION</i>	53

# GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Tata Kelola Perusahaan



Sepanjang tahun 2013, pelaksanaan GCG telah menjadi perhatian manajemen Bank, sebagai proses berkesinambungan dalam melanjutkan upaya-upaya yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya

*During 2013, the implementation of GCG was the focus of the Bank's management as a sustainable process in continuing the efforts done in previous years*

## I. PENDAHULUAN INTRODUCTION



PT Bank ANZ Indonesia (“Bank”) memiliki aspirasi untuk menjadi salah satu bank campuran terkemuka di Indonesia dengan fokus yang kuat untuk memenuhi kebutuhan nasabah.

Bank menyadari bahwa penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance - GCG*) yang baik, merupakan langkah awal yang sekaligus juga merupakan dasar utama dari proses transformasi untuk mewujudkan aspirasi tersebut. GCG merupakan proses jangka panjang yang memberikan hasil berupa *sustainable value*, oleh karena itu Bank senantiasa menyempurnakan praktik-praktik bisnis yang sehat dan melaksanakan praktik perbankan yang *prudential* dalam setiap kegiatan operasional Bank.

Hal ini utamanya dilakukan dalam rangka memberikan nilai tambah bagi nasabah, karyawan, pemegang saham, maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan Bank.

*PT Bank ANZ Indonesia (“Bank”) has aspiration to be one of the leading joint-venture banks in Indonesia with a strong focus on customers’ needs.*

*Bank realizes that the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principle is an initial step and a basic start of transformation process to achieve its aspiration. GCG is a long-term process that aims to achieve sustainable value, accordingly Bank will always attune its practices and conduct prudential banking in each and every operational activity of the Bank.*

*This is mainly done in order to provide additional value for customers, employees, shareholders and other stakeholders of the Bank.*

Sepanjang tahun 2013, pelaksanaan GCG telah menjadi perhatian manajemen Bank, sebagai proses berkesinambungan dalam melanjutkan upaya-upaya yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya, yang terutama bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan efisiensi kinerja Bank, yang pada akhirnya akan berakibat pada meningkatnya pelayanan pada pihak-pihak yang berkepentingan dengan Bank, yang tidak hanya terbatas pada nasabah, melainkan juga regulator (Bank Indonesia), pemerintah, karyawan, serta pemegang saham.
- b. Meningkatkan minat dan kepercayaan pihak-pihak yang berkepentingan dengan Bank.
- c. Melindungi Bank dari potensi tuntutan hukum, yang disebabkan oleh ketidaktaatan Bank terhadap peraturan-peraturan yang berlaku.

Bank telah berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip utama dari GCG, termasuk pengelolaan Bank secara profesional berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Aktualisasi GCG sebagai sebuah sistem dilakukan melalui sistem internal yang melibatkan Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan seluruh karyawan.

Laporan ini secara garis besar akan mengetengahkan upaya-upaya Bank dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip utama GCG.

*During 2013, the GCG implementation had been the focus of the Bank's management as a sustainable process in continuing the efforts done in previous years, which primarily aimed to:*

- a. Improve the efficiency of Bank's performance which ultimately will contribute towards the services improvement given to every stakeholder of the Bank, and not only limited to customers, but also regulator (Bank Indonesia), government, employees, as well as shareholders.*
- b. Enhance the level of interest and trust from all stakeholders.*
- c. Protect the Bank from potential legal suits due to non-compliance with prevailing regulations.*

*Bank has been putting efforts to implement basic principles of GCG, including professional management of the Bank, in accordance to transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness principles. GCG implementation as a system is being done internally with the involvement of the Board of Commissioners, Board of Directors and all employees.*

*This report deals mainly with the Bank's efforts to implement GCG principles.*

## II. TRANSPARANSI TRANSPARENCY

Aspek transparansi dalam penerapan praktik-praktik GCG didefinisikan sebagai keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Transparansi pelaksanaan GCG tercermin dari implementasi praktik-praktik seperti tersebut di bawah ini:

### A. Pengungkapan Pelaksanaan Good Corporate Governance yang Meliputi 7 (tujuh) Aspek Cakupan Good Corporate Governance

#### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung-jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi

Per tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, jumlah, susunan dan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Bank adalah sebagai berikut:

Jabatan/ Title	2013		2012		Domisili/ Domicile
	Nama/ Name	Kewarganegaraan/ Citizenship	Nama/ Name	Kewarganegaraan/ Citizenship	
Presiden Komisaris (Independen)/ President Commissioner (Independent)	Enrique V. Bernardo	Filipina/ Filipino	Enrique V. Bernardo	Filipina/ Filipino	Filipina/ Philippines
Komisaris/ Commissioner	Bill Foo Say Mui	Singapura/ Singaporean	Bill Foo Say Mui	Singapura/ Singaporean	Singapura/ Singapore
Komisaris Independen/ Independent Commissioner	Jusuf Arbianto Tjondrolukito	Indonesia/ Indonesian	Jusuf Arbianto Tjondrolukito	Indonesia/ Indonesian	Indonesia/ Indonesia
Komisaris Independen/ Independent Commissioner	Anies Rasyid Baswedan	Indonesia/ Indonesian	Anies Rasyid Baswedan	Indonesia/ Indonesian	Indonesia/ Indonesia

Komposisi Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan yang ditentukan antara lain sebagai berikut:

- Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen
- Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen
- Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi
- Paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia

*The transparency aspect in implementing GCG practices is defined as openness in delivering material and relevant information as well as openness in decision making. The transparency of GCG implementation is reflected in the implementation of the following practices:*

### A. Disclosure of Good Corporate Governance Implementation Comprising of 7 (seven) Aspects of Good Corporate Governance Principles

#### 1. The Implementation of Duties and Responsibilities of Board of Commissioners and Board of Directors

*As of December 31, 2013 and 2012, the numbers, formation and composition of Bank's Board of Commissioners and Directors are as follows:*

*The composition of Board of Commissioners has fulfilled the following requirements:*

- The Board of Commissioners shall consist of Commissioners and Independent Commissioners*
- At least 50% (fifty percent) of the number of the Board of Commissioners members shall be Independent Commissioners*
- The members of the Board of Commissioners shall be no less than 3 (three) persons and not more than the number of the Board of Directors members*
- At least 1 (one) member of the Board of Commissioners must be domiciled in Indonesia*



Terkait dengan fungsi pengawasan yang harus dilakukannya, Dewan Komisaris secara teratur menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dan memberikan rekomendasinya terhadap Dewan Direksi Bank. Selama tahun 2013, telah dilaksanakan 5 (lima) kali rapat Dewan Komisaris.

Untuk pembagian tugas Dewan Komisaris, Bank telah memiliki dokumen Pembagian Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, yang secara garis besar mengatur tentang pedoman dan tata tertib kerja, termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat. Dokumen tersebut juga mendefinisikan tugas Dewan Komisaris yang mencakup fungsi:

- Pengawasan terhadap pelaksanaan GCG.
- Pengawasan Strategik.
- Pengawasan terhadap Risiko.

Susunan Dewan Direksi Bank pada tahun 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

*With respect to the oversight function, the Board of Commissioners holds regular meetings and provides recommendations to the Board of Directors throughout 2013, the Board of Commissioners conducted 5 (five) meetings.*

*With regards to allocation of duties among members of the Board of Commissioners, the Bank prepared a document outlining the Duties and Authorities of the Board stipulating guidelines and working orders, including work etiquettes, working hours and frequency of meetings. The document also described the duties of the Board of Commissioners covering:*

- *Supervision of GCG implementation.*
- *Strategic Supervision.*
- *Supervision of Risks.*

*Composition of the Bank's Board of Directors in 2013 and 2012 is as follows:*

Jabatan/ Title	2013		2012		Domisili/ Domicile
	Nama/ Name	Kewarganegaraan/ Citizenship	Nama/ Name	Kewarganegaraan/ Citizenship	
Presiden Direktur/ President Director	Joseph Abraham	Singapura/ Singapore	Joseph Abraham	Singapura/ Singapore	Indonesia/ Indonesia
Wakil Presiden Direktur Perbankan Konsumen/ Vice President Director Consumer Banking	Ajay Surendra Mathur	India/ Indian	Ajay Surendra Mathur	India/ Indian	Indonesia/ Indonesia
Direktur Perbankan Instiusional/ Director of Institutional Banking	Sity Leo Samudera <sup>1</sup>	Indonesia/ Indonesian	-	Indonesia/ Indonesia	Indonesia/ Indonesia
Direktur Kepatuhan dan Legal/ Director of Compliance and Legal	Muhamadian Rostian	Indonesia/ Indonesian	Muhamadian Rostian	Indonesia/ Indonesia	Indonesia/ Indonesia
Direktur Perbankan Ritel/ Director of Retail Banking	Anthony Soewandy <sup>2</sup>	Indonesia/ Indonesian	Anthony Soewandy	Indonesia/ Indonesia	Indonesia/ Indonesia
Direktur Treasuri/ Director of Treasury	Martin Mulwanto <sup>3</sup>	Indonesia/ Indonesian	Martin Mulwanto	Indonesia/ Indonesia	Indonesia/ Indonesia
Direktur Bisnis Pembiayaan Konsumen/ Director of Consumer Finance	Luskito Hambali	Indonesia/ Indonesian	-	Indonesia/ Indonesia	Indonesia/ Indonesia

1. Per tanggal 4 Juni 2013, Bank Indonesia menyetujui pengangkatan Sity Leo Samudera sebagai Direktur Institutional Banking.
2. Per tanggal 29 April 2013, Anthony Soewandy mengundurkan diri dari jabatan sebagai Direktur Perbankan Ritel yang disetujui pemegang saham Bank melalui Sirkuler Resolusi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank ANZ Indonesia tertanggal 18 Juli 2013.
3. Martin Mulwanto mengundurkan diri dari jabatan Direktur Treasuri pada tanggal 24 Maret 2014 dan telah memperoleh persetujuan pemegang saham melalui Pernyataan Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 27 Maret 2014

1. *Effective June 4, 2013, Bank Indonesia approved the appointment of Sity Leo Samudera as Director of Institutional Banking.*
2. *On 29 April 2013, Anthony Soewandy resigned as Director of Retail Banking which was then approved by Bank's shareholders through Circular Resolution of General Meeting of Shareholders PT Bank ANZ Indonesia dated 18 July 2013.*
3. *Martin Mulwanto has resigned from his position as Director of Treasury on March 24, 2014 and has obtained approved from shareholders through Circular Resolution of the Extra Ordinary General Meeting of Shareholders dated March 27, 2014*

Komposisi Dewan Direksi Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk GCG serta penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/8/PBI/2007, yaitu sebagai berikut:

- a. Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang.
- b. Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.
- c. Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur atau Direktur Utama.
- d. Mayoritas anggota Direksi wajib berkewarganegaraan Indonesia.

Selama tahun 2013, telah dilaksanakan 12 (dua belas) kali rapat Dewan Direksi.

Keseluruhan tugas, tanggung jawab dan wewenang dari Direksi telah dimasukkan ke dalam deskripsi dan uraian jabatan masing-masing anggota Direksi, yang pencapaiannya akan dinilai melalui pemantauan kinerja anggota Direksi.

Tugas dan tanggung-jawab Dewan Direksi adalah sebagai berikut:

• **Presiden Direktur**

Bertanggung-jawab terhadap keseluruhan aspek bisnis dan operasional Bank, termasuk fungsi pendukung keuangan, perpajakan, teknologi informasi dan sumber daya manusia. Pejabat eksekutif yang melapor kepada Presiden Direktur termasuk Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dan Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) atau *Chief Risk Officer* (CRO).

*The composition of the Board of Directors of the Bank has fulfilled the prevailing regulation of GCG and Expatriate Usage as stipulated in Bank Indonesia (BI) regulation No. 9/8/PBI/2007 as follows:*

- a. The number of Board of Directors' members shall be no less than 3 (three) persons.*
- b. All members of the Board of Directors must be domiciled in Indonesia.*
- c. The Board of Directors shall be led by a President Director or a Chief Director.*
- d. The majority of members of Directors must be Indonesian citizens.*

*Throughout 2013, the Board of Directors met 12 (twelve) times.*

*The duties, responsibilities and authorities of the Board of Directors have been included in the job description of each member of the Board of Directors. Their achievement will be assessed through performance assessments.*

*The duties and responsibilities of the Board of Directors are as follows:*

• **President Director**

*Responsible for the whole aspects of the Bank's business and operations, including financial, taxation, information technology and human resources support functions. Executive officers who report to the President Director are the Head of Internal Audit (IA) and Head of the Risk Management Unit (RMU) or Chief Risk Officer (CRO).*

- **Wakil Presiden Direktur Consumer Banking**

Bertanggung-jawab terhadap *consumer banking* yang meliputi ritel dan *wealth*, termasuk diantaranya perbankan ritel dan *consumer finance*. Selain Presiden Direktur, Wakil Presiden Direktur juga memiliki kewenangan mewakili Bank dalam menjalin hubungan dengan pihak eksternal.

- **Direktur Institutional Banking**

Bertanggung-jawab atas keseluruhan perbankan korporasi, termasuk *trade finance, cash management*, perbankan komersial dan *private banking*.

- **Direktur Kepatuhan dan Legal**

Bertanggung-jawab memastikan kepatuhan Bank terhadap peraturan dan hukum yang berlaku serta perjanjian atau komitmen terhadap pihak ketiga.

- **Direktur Treasuri**

Bertanggung-jawab terhadap bisnis treasuri Bank serta manajemen likuiditas (termasuk pengelolaan aset dan liabilitas) dan permodalan Bank.

- **Direktur Perbankan Ritel**

Bertanggung-jawab terhadap keseluruhan aspek bisnis perbankan ritel, termasuk *signature priority banking* dan *wealth management*.

- **Direktur Bisnis Pembiayaan Konsumen**

Bertanggung-jawab terhadap keseluruhan aspek bisnis pembiayaan konsumen, baik di segmen kartu kredit maupun pinjaman personal.

- **Vice President Director of Consumer Banking**

*Responsible for consumer banking, including retail and wealth, among others retail banking and consumer finance. Besides the President Director, the Vice President Director is also authorised to represent Bank in making any relation with external parties.*

- **Director of Institutional Banking**

*Responsible for the whole activities of corporate banking, including trade finance, cash management, commercial banking and private banking.*

- **Director of Compliance and Legal**

*Responsible for ensuring compliance with regulations and applicable laws and agreements and/or commitments with third parties.*

- **Director of Treasury**

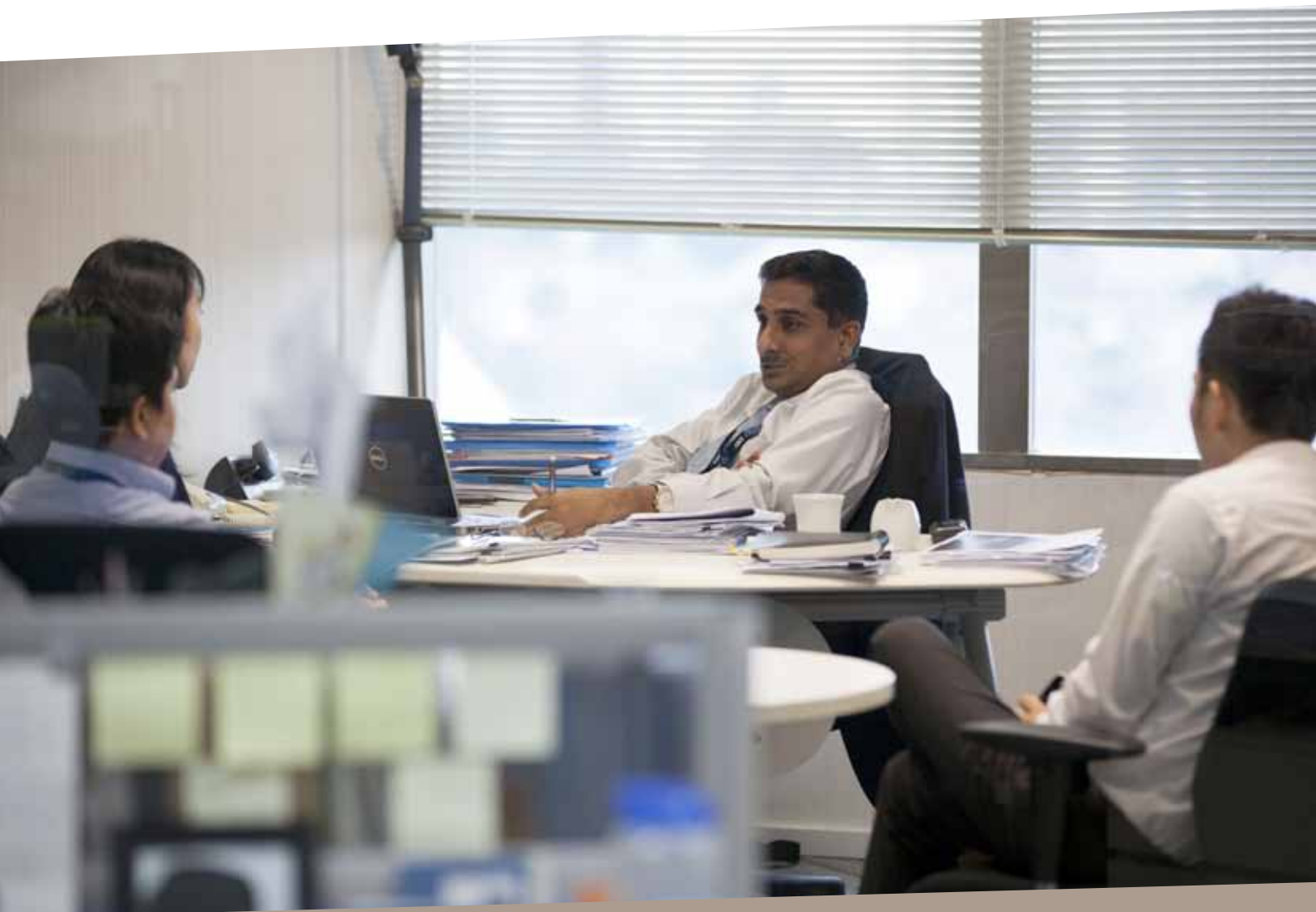
*Responsible for the Bank's treasury business and liquidity management (including assets and liabilities management) and also Bank's capital.*

- **Director of Retail Banking**

*Responsible for the whole aspects of retail banking business, including the signature priority banking and wealth management.*

- **Director of Consumer Finance**

*Responsible for the whole aspects of consumer finance business, both in the credit card and personal loan segments.*



Aspek transparansi dalam penerapan praktik-praktik GCG didefinisikan sebagai keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

*The transparency aspect in implementing GCG practices is defined as openness in delivering material and relevant information as well as openness in decision making.*

## **2. Kelengkapan dan Pelaksanaan tugas Komite-komite**

Sebagai salah satu sarana untuk membantu menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

### **a) Komite Audit**

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan BI No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, Komite Audit diketuai oleh seorang komisaris independen dan beranggotakan dua pihak independen yang memiliki kualifikasi sebagaimana dipersyaratkan dalam PBI. Komite Audit Bank beranggotakan pihak-pihak tersebut di bawah ini:

- Jusuf Arbianto Tjondrolukito, sebagai ketua sekaligus mewakili peran komisaris independen dalam komite.
- Adriana Muliando, berperan sebagai pihak independen yang memiliki keahlian dalam bidang keuangan.
- Herlanto Anggono, berperan sebagai pihak independen yang memiliki keahlian dalam bidang perbankan.

Tugas, wewenang, tanggung jawab dan pedoman kerja dari Komite Audit tersebut di atas, secara menyeluruh telah dituangkan dalam bentuk Piagam Komite Audit.

Sepanjang tahun 2013, telah dilakukan 3 (tiga) kali rapat Komite Audit, yakni pada tanggal 22 Januari 2013, 3 April 2013, dan 6 September 2013.

## **2. Completeness and Implementation of the Tasks of Committees**

*As one of the instruments utilised to support the execution of their supervisory function, the Board of Commissioners has established Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration and Nomination Committee.*

### *a) Audit Committee*

*According to the stipulation written in BI regulation No. 8/4/PBI/2006 concerning Good Corporate Governance Implementation by Commercial Banks, Audit Committee is to be led by an independent commissioner and has two independent members with qualifications as defined in the mentioned BI regulation. Audit Committee of the Bank is composed of the following parties:*

- *Jusuf Arbianto Tjondrolukito is the Head of the Committee and acts as an independent commissioner in the committee.*
- *Adriana Muliando is an independent party with expertise in finance.*
- *Herlanto Anggono is an independent party with expertise in the banking industry.*

*Duties, authorities, responsibilities and working guidelines of the above mentioned Audit Committee, have been documented in Audit Committee Charter.*

*Throughout 2013, 3 (three) meetings have been conducted by the Audit Committee on 22 January 2013, 3 April 2013, and 6 September 2013.*

## b) Komite Pemantau Risiko

Per tanggal 28 November 2012, Dewan Komisaris mengangkat Anies Rasyid Baswedan yang merupakan komisaris independen sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko melalui Resolusi Dewan Komisaris.

Tidak terdapat perubahan pada komposisi keanggotaan dari Komite Pemantau Risiko, dengan rincian adalah sebagai berikut:

- Adriana Muliando, berperan sebagai pihak independen yang memiliki keahlian dalam bidang keuangan.
- Herlanto Anggono, berperan sebagai pihak independen yang memiliki keahlian dalam bidang manajemen risiko.

Berdasarkan Piagam Komite Pemantau Risiko, tugas dan tanggung jawab utama yang diemban oleh komite ini adalah untuk mengevaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaannya, serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dari Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko sendiri.

Dalam rangka mewujudkan program kerja seperti telah disebutkan di atas, Bank secara berkala menyampaikan laporan-laporan yang berhubungan dengan fungsi pengawasan dan pemantauan yang dilakukan oleh kedua komite tersebut di atas kepada Dewan Komisaris, seperti misalnya hasil audit berkala yang dilakukan oleh SKAI Bank, risalah rapat Komite Manajemen Risiko yang dilakukan secara bulanan serta hasil audit yang dilakukan baik oleh Grup, auditor eksternal, maupun audit tahunan yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

Sepanjang tahun 2013, telah dilakukan 3 (tiga) kali rapat Komite Pemantau Risiko, yakni pada tanggal 22 Januari 2013, 3 April 2013, dan 6 September 2013.

## b) Risk Monitoring Committee

*On 28 November 2012, the Board of Commissioners through its resolution, appointed Anies Rasyid Baswedan - an independent commissioner - as the Chairman of the Risk Monitoring Committee.*

*There is no change to the membership composition of the Risk Monitoring Committee, with details are as follows:*

- *Adriana Muliando, acting as an independent party with expertise in finance.*
- *Herlanto Anggono, acting as an independent party with expertise in risk management.*

*According to the Risk Monitoring Committee Charter, the duties and responsibilities carried out by this Committee is to evaluate the consistency between risk management policy and the execution, and also to conduct supervision and evaluation of the execution of duties of Risk Management Committee and Risk Management Unit.*

*In order to accomplish the working programs as mentioned above, the Bank periodically delivers reports to the Board of Commissioners in relation to supervision and monitoring functions done by those two committees, such as the results of periodic audits performed by the Bank's Internal Audit Unit, minutes of meetings of Risk Management Committee done on a monthly basis, as well as the results of the audit performed by the Group, external auditor, and Bank Indonesia's annual audit team.*

*Throughout 2013, 3 (three) meetings have been conducted by the Risk Monitoring Committee on 22 January 2013, 3 April 2013, and 6 September 2013.*

c) Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam rangka memenuhi komitmennya untuk melaksanakan *Good Corporate Governance*, pada tanggal 30 Juni 2008, Bank membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi yang beranggotakan:

- Enrique V. Bernardo, sebagai ketua yang juga mewakili peranan komisaris independen dalam komite.
- Bill Foo Say Mui, anggota komite yang juga merupakan komisaris Bank.
- Sulianti Setiabudi, berperan sebagai anggota komite yang merupakan pejabat eksekutif yang membawahi bagian sumber daya manusia Bank.

Fungsi dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi, termasuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham, serta kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- Memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur pemilihan penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- Jika terdapat kekosongan jabatan atau perekrutan anggota Dewan Komisaris atau Dewan Direksi baru, maka komite ini memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi tersebut kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Selama tahun 2013, Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan 1 (satu) kali Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 3 April 2013.

c) *Remuneration and Nomination Committee*

*In order to fulfill the commitment to conduct Good Corporate Governance, on June 30, 2008, the Bank has established a Remuneration and Nomination Committee whose members are as follows:*

- *Enrique V. Bernardo - an independent commissioner - as Chairman*
- *Bill Foo Say Mui as a committee member who is also the Bank's commissioner.*
- *Sulianti Setiabudi acts as committee's member who is also the executive officer heading Human Resource Division of the Bank.*

*The functions and responsibilities of Remuneration and Nomination Committee are as follows:*

- *Conduct evaluation on remuneration policy, which include giving recommendation concerning remuneration policy to the Board of Commissioners in relation to the remuneration policy for the Board of Commissioners and Directors, to be submitted to the General Meeting of Shareholders. In addition, the remuneration policy for executive officers and all employees to be submitted to the Board of Directors.*
- *Provide recommendation with regards to the system and procedures for the appointment and replacement of members of Board of Commissioners and Board of Directors to the Board of Commissioners for further submission to General Meeting of Shareholders.*
- *If there is a vacancy or new recruitment in the Board of Commissioners or Board of Directors, then this committee may also provide recommendation on the candidate for the aforementioned Board member to the Board of Commissioners for further submission to the General Meeting of Shareholders.*

*Throughout 2013, 1 (one) meeting has been conducted by the Remuneration and Nomination Committee on 3 April 2013.*

### 3. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Internal, dan Audit Eksternal

#### a) Fungsi Kepatuhan

Dalam upayanya untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan BI maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, Bank memiliki Satuan Kerja Kepatuhan, yang dikepalai oleh seorang Direktur. Satuan kerja Kepatuhan ini bersifat independen terhadap satuan kerja operasional, karena tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan operasional Bank sehari-hari.

Di bawah Direktur Kepatuhan dan Legal saat ini terdapat dua divisi yaitu divisi Kepatuhan dan divisi Legal. Pembentukan divisi Legal merupakan langkah Bank untuk memitigasi risiko hukum sejalan dengan rencana ekspansi Bank. Selain itu, sejalan dengan ekspansi tersebut, divisi Kepatuhan sendiri saat ini juga telah berkembang dari segi jumlah sumber daya manusia.

Lebih lanjut, untuk memperkuat fungsi pengawasan dari satuan kerja Kepatuhan, maka divisi Kepatuhan dibagi menjadi 2 (dua) unit kerja, yaitu unit kerja Kepatuhan – Instusional, Ritel dan MLRO dan unit kerja Kepatuhan - *Consumer Finance* dan Proyek. Unit kerja Kepatuhan - Instusional, Ritel dan MLRO bertanggung jawab antara lain untuk mengkoordinasi dan mengelola risiko kepatuhan dan penerapan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer/KYC*) dan anti pencucian uang (*Anti Money Laundering/AML*) serta memastikan ketersediaan dan kesesuaian pedoman, sistem dan prosedur yang terkini untuk seluruh satuan kerja dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di seluruh jenjang organisasi. Sedangkan unit kerja Kepatuhan - *Consumer Finance* dan Proyek berperan dalam memastikan aspek kepatuhan Divisi *Consumer Finance* dan setiap proyek terkait dengan rencana ekspansi bisnis Bank, yang meliputi antara lain terkait jaringan kantor dan ATM serta peluncuran produk dan layanan baru.

### 3. The Implementation of Compliance, Internal Audit and External Audit Functions

#### a) Compliance Function

*In order to ensure compliance with BI regulations and other prevailing regulations, the Bank has established a Compliance Unit led by a Director. This Compliance Unit is independent from operational business unit as it does not take part in Bank's daily operational activities.*

*Under the Director of Compliance and Legal, there are two divisions; Compliance and Legal divisions. The forming of the Legal division is part of the Bank's strategy to mitigate legal risk in relation with the Bank's expansion. In addition, in line with the expansion plan, the Compliance division has also increased the number of its human resources.*

*Furthermore, in order to strengthen the supervisory function of the Compliance unit, the Compliance Department is divided into 2 (two) units; Compliance – Insto, Retail and MLRO and Compliance – Consumer Finance and Project. Compliance – Insto, Retail and MLRO is responsible for coordinating and managing compliance risk for Insto and Retail business and the implementation of Know Your Customer/KYC and Anti Money Laundering/AML principles as well as ensuring the availability and suitability of current guidelines, systems and procedures for all business units with the prevailing law, at all stages of the organization. Meanwhile, the Compliance – Consumer Finance and Project acts to ensure the aspect of compliance in Consumer Finance and every project related to the business expansion, among others are related to office and ATM network as well as the launch of new products and services.*



Sepanjang tahun 2013, beberapa program kerja yang telah dilaksanakan oleh satuan kerja Kepatuhan antara lain:

- Melakukan analisis dan identifikasi produk dan kegiatan baru untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku.
- Melakukan sosialisasi terhadap pejabat dan petugas dari unit kerja terkait mengenai adanya peraturan baru yang berlaku.
- Melakukan sosialisasi mengenai kepatuhan atas pelaksanaan KYC dan AML terhadap bisnis unit terkait.
- Menyampaikan laporan terkait adanya transaksi keuangan tunai dan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK.
- Implementasi skenario baru untuk pengawasan transaksi keuangan mencurigakan.
- Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Pembisik (*Whistleblower Protection Policy*) dimana Bank mendorong staf untuk melaporkan kemungkinan tindakan tercela/pelanggaran/tindakan tidak etis.
- Penunjukan *Whistleblower Protection Champions*.
- Mengkomunikasikan kepada seluruh karyawan mengenai kasus-kasus pelanggaran *fraud* yang terjadi di Bank dan pelajaran yang dapat dipetik dari kasus tersebut sehingga tidak terulang kembali di masa yang akan datang melalui *Message from Compliance*.
- Memiliki Kebijakan KYE (*Know Your Employee*) sebagai salah satu wujud penerapan anti pencucian uang dan strategi *anti-fraud*.
- Melaksanakan *compliance testing* sebagai bagian dari aktivitas *quality assurance* terhadap implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Membina hubungan baik dengan Pemerintah dan BI serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator.

*During 2013, there were some work programs that were completed by Compliance unit, among others:*

- *Conducted analysis and identification of new products and activities to ensure compliance with prevailing regulations.*
- *Conducted socialization to officials and officers from relevant business units concerning new and relevant regulations.*
- *Conducted socialization of KYC and AML implementation for relevant business units.*
- *Submitted reports of cash and suspicious transaction to PPATK.*
- *Implementation of new detection scenarios for monitoring suspicious transactions.*
- *Socialization of the Whistleblower Protection Policy where the Bank encourages its staff to report the possibilities of reportable actions/violations/unethical conduct.*
- *The appointment of Whistleblower Protection Champions.*
- *Communicating to all employees regarding the cases of frauds which have occurred at the Bank and the lessons learned from such cases in order to avoid repeated cases the in the future through Message from Compliance.*
- *Having a KYE (Know Your Employee) Policy as one of the forms of the implementation of the anti-money laundering and anti-fraud strategy.*
- *Conduct compliance testing as part of quality assurance activity on the regulatory implementation within business units.*
- *Fostering good relations with the government and the central bank (BI) and the FSA (Financial Service Authority).*

Dalam rangka memenuhi kewajiban Bank untuk menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan kepada Bank Indonesia sebagaimana diatur oleh Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2013 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Bank telah menyusun Laporan Direktur Kepatuhan untuk Semester I (pertama) yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan Semester II (kedua) yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.

Secara keseluruhan, tingkat kepatuhan Bank terhadap seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pemenuhan komitmen kepada otoritas yang berwenang relatif baik.

Pada tahun 2013, terdapat beberapa pelanggaran berupa kesalahan input pelaporan SID hasil *Crash Program* 2012, keterlambatan pelaporan koreksi SID, pelanggaran ketentuan Giro Wajib Minimum, keterlambatan penyampaian Laporan Debitur, kesalahan penggunaan TRN (*Transaction Reference Number*) untuk TSA (*Treasury Single Account*), kesalahan pengisian LHB, kelalaian dalam melakukan pengawasan kecukupan *prefund* TPK, keterlambatan penyampaian LKPBU, kesalahan pelaporan LBU dan keterlambatan penyampaian koreksi LBU. Bank juga menerima surat teguran dari Bapepam-LK mengenai keterlambatan pelaporan transaksi efek.

Atas pelanggaran yang terjadi, Bank telah melakukan pencatatan yang lengkap atas semua teguran Bank Indonesia tersebut dalam BOLD (Bankwide Operational Loss Database) dan telah meminta departemen terkait untuk memperbaiki kesalahan sehingga tidak terulang lagi di masa yang akan datang dan senantiasa melakukan pelaporan secara tepat waktu dan tepat isi.

*In order to fulfill the Bank's obligation of providing the report on the principal duties of Director of Compliance to Bank Indonesia as stipulated by Bank Indonesia Regulation No.13/2/PBI/2013 concerning the Implementation of the Compliance Function for Commercial Banks, the Bank had prepared the report of Director of Compliance for the First Semester ended on 30 June, 2013 and Second Semester ended on 31 December 2013.*

*In general, the Bank's compliance level towards stipulations and prevailing regulations as well as fulfillment of all commitments to regulators is good.*

*In 2013, there were some violations such as input error in the Debtor Information System reporting as a result of Crash Program 2012, late submission of Debtor Information System correction report, violation of statutory reserve requirements, late submission of Debtor report, error in the usage of TRN (Transaction Reference Number) for TSA (Treasury Single Account), input error on Commercial Bank Daily Report, negligence in monitoring the prefund adequacy for TPK, late submission of Commercial Bank Head Office report, error on Commercial Bank report correction. Bank also received warning letters from the Capital Market Supervisory Agency-Financial Institution regarding the late submission of securities transaction report.*

*With regards to said breaches, Bank has completely listed all of those incidents and Bank Indonesia warnings in BOLD (Bankwide Operational Loss Database) and has requested relevant departments to rectify the mistake and ensure that similar mistake can be prevented in the future and continue to submit reports in timely manner and with precise content.*

## b) Fungsi Audit Internal

Fungsi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) secara berkesinambungan melaksanakan pemeriksaan yang independen terhadap risiko- risiko yang penting bagi Bank. SKAI juga telah berkembang membantu memperbaiki dan mendorong budaya yang berfokus pada risiko melalui kerjasama dengan unit manajemen risiko lainnya. Dengan budaya akuntabilitas atas risiko yang tinggi, hal ini memberikan manfaat bagi Bank dalam menghadapi perubahan keadaan risiko yang lebih dinamis.

Sesuai dengan *Internal Audit Charter*, SKAI merupakan fungsi terpisah dari manajemen Bank yang memberikan pemeriksaan dan penilaian yang independen dan obyektif serta memberikan jasa konsultasi yang akan membantu Bank melindungi kepentingan dari pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Sesuai dengan *Internal Audit Charter* yang disetujui oleh Dewan Komisaris, SKAI melaporkan secara langsung hasil audit tahunan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit, dimana SKAI memiliki jalur komunikasi dan operasional harian langsung kepada Presiden Direktur.

SKAI merupakan unit yang independen dan tidak memiliki kendali langsung terhadap unit atau kegiatan operasional yang menjadi obyek pemeriksaan.

SKAI memiliki akses yang tidak terbatas atas seluruh kegiatan, catatan, properti dan personil dari Bank. Ruang lingkup Audit Internal meliputi seluruh entitas audit di PT. Bank ANZ Indonesia.

Sebagai pedoman bagi SKAI, Bank telah menyusun Piagam Audit Internal yang telah ditanda tangani oleh Presiden Direktur dan Dewan Komisaris.

Sebagai perwujudan dari pelaksanaan fungsi pengawasan yang efektif dan komprehensif, SKAI melakukan kaji ulang secara berkala atas kegiatan operasional Bank, kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal Bank.

## b) Internal Audit Function

*The function of the Internal Audit Unit (Internal Audit) continuously carries out an independent examination of the important risks for the Bank. Internal Audit also has grown to help improve and encourage a culture that focuses on risk through cooperation with other risk management units. With a culture of high accountability for risk, it provides benefits to the Bank to face more dynamic risk changes.*

*Pursuant to the Internal Audit Charter, Internal Audit is a separate function of the Bank's management that provides an independent and objective examination and assessment and as well as providing consulting services that will help the Bank protect the interests of shareholders and other stakeholders.*

*In accordance to the Internal Audit Charter approved by the Board of Commissioners, Internal Audit reports the result of the annual audit directly to the Board of Commissioners through the Audit Committee, whereby the Internal Audit Unit has a line of communication and direct daily operations to the President Director.*

*Internal Audit is an independent function and has no direct authority over the business unit or operational activities being reviewed.*

*Internal Auditor has unrestricted access to all the activities records, property and employees of Bank. Internal Audit's scope covers all audit entities within PT Bank ANZ Indonesia.*

*As a guideline for Internal Audit in performing their duties and responsibilities, Bank has established an Internal Audit Charter which was signed by the President Director and Board of Commissioners.*

*In carrying out effective and comprehensive internal audit function, Internal Audit conducts review on a regular basis of the Bank's operational activities, the adequacy and effectiveness of Bank's internal control system.*

Pada tahun 2013, SKAI telah melaksanakan audit atas 18 entitas audit (100% dari rencana audit tahun 2013) berdasarkan perencanaan audit berbasis risiko yang mencakup: Risiko Kredit, *Personal Loan*, Manajemen Risiko Operasional, *Payment and Cash Operation*, *Trade and Supply Chain*, Manajemen Aset Teknologi, Keamanan Teknologi, Manajemen ATM, Pembayaran SKN dan RTGS dan 9 kantor cabang perbankan retail.

Hasil pemeriksaan disampaikan ke Dewan Direksi. Hasil tindak lanjut pemeriksaan yang signifikan juga disampaikan kepada Komite Audit, sebagai sarana bagi Komite Audit untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas SKAI.

SKAI akan terus berkoordinasi secara berkesinambungan dengan masing-masing unit bisnis yang berperan aktif dalam melakukan pemantauan atas perkembangan tindak lanjut temuan audit.

Memenuhi ketentuan GCG serta kepatuhan SKAI terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank (SPFAIB), SKAI Bank telah diaudit oleh pihak eksternal, untuk memastikan efektivitas SKAI dalam melaksanakan tugasnya.

SKAI telah membuat rencana audit yang berbasis risiko sesuai dengan tingkat risiko yang telah diukur

Rencana pelatihan dan pengembangan kompetensi tahunan SKAI mencakup pelatihan dasar, kemampuan teknis dan kepemimpinan. Staf juga diharuskan untuk memperbaharui pemahaman independensi melalui pelatihan kode etik perusahaan yang dilakukan secara tahunan.

Kualitas metodologi pemeriksaan juga terus diperbaiki. Evaluasi pemeriksaan juga mencakup area pemahaman dan tindakan manajemen atas risiko dan kontrol terkait, dalam usaha perbaikan dalam kesenjangan kontrol secara penuh dan tepat waktu.

*In 2013, Internal Audit performed audits on 18 entities (100% of 2013 audit plan) based on risk-based audit plan which covered: Credit Risk, Personal Loan, Operational Risk Management, Payment and Cash Operation, Trade and Supply Chain, Technology Asset Management, Technology Security, ATM Management, Payment SKN and RTGS and 9 retail banking branches.*

*The audit results were submitted to the Board of Directors. The results of the significant follow-up examination was also delivered to the Audit Committee, for the Audit Committee to perform monitoring and evaluating function towards the implementation of the Internal Audit assignments.*

*Internal Audit will continue to coordinate on an ongoing basis with each business unit that plays an active role in monitoring the development of the follow-up of audit findings.*

*In fulfilling the GCG requirements and compliance with Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank (SPFAIB), Internal Audit has been audited by an external party to ensure its effectiveness in conducting their duties.*

*Internal Audit has developed a risk-based audit plan in accordance with the level of risk that has been measured.*

*Annual training and competence development plan for Internal Audit covers basic training, technical and leadership abilities. Staff are also required to update the understanding of independence through the company's code of ethics training that is done on an annual basis.*

*The quality of examination methodology also continue to improve. The evaluation of examination also covers the management understanding and action towards risks and associated controls, in an attempt to repair the gap control in full and in a timely manner.*

### c) Fungsi Audit Eksternal

Selama beberapa tahun terakhir, Bank menunjuk KAP Siddharta Siddharta Widjaja, anggota dari KPMG International, sebagai auditor eksternal dari Bank. KAP ini tercatat sebagai salah satu dari empat KAP besar dan terkemuka, baik di Indonesia maupun di dunia internasional.

Fakta tersebut di atas juga merupakan salah satu pertimbangan utama dari Bank dalam melakukan penunjukan KAP Siddharta Siddharta Widjaja. Karena posisinya sebagai salah satu dari empat KAP besar dan terkemuka, diharapkan agar KAP ini memiliki kapasitas untuk bersikap independen dan profesional, dalam melakukan kegiatan auditnya terhadap Bank.

Penunjukan KAP Siddharta Siddharta Widjaja sebagai auditor Bank dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit tertanggal 14 Juni 2013 yang kemudian disetujui melalui Rapat Umum Pemegang Saham, dan terdokumentasi dalam Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal 28 Juni 2013. Penunjukan ini telah mempertimbangkan keharusan untuk melakukan penggantian auditor eksternal setiap lima tahun sekali.

### c) External Audit Function

*In the last few years, Bank has been appointing Public Accountant Firm (KAP) Siddharta Siddharta Widjaja, a member of KPMG International, to be the external auditor of the Bank. This KAP is one of four biggest KAP in Indonesia and the world.*

*The above-mentioned fact is one of the Bank's main considerations in appointing KAP Siddharta Siddharta Widjaja. Owing to its big-four position, this KAP is expected to be independent and professional in conducting their audit on the Bank.*

*The appointment of KAP Siddharta Siddharta Widjaja as the Bank's auditor was done based on recommendation from Audit Committee dated 14 June 2013 and approved through the General Meeting of Shareholders, and documented in the Circular Resolution of General Meeting of Shareholders dated 28 June 2013. This appointment has considered the necessity of replacing the external auditor once in five years.*



#### **4. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Internal**

Bank menyadari, bahwa perkembangan pesat dunia perbankan, yang secara langsung mempengaruhi kondisi internal dan eksternal dari kegiatan usaha Bank, menyebabkan meningkatnya potensi risiko yang dihadapi oleh Bank. Oleh karena itu, Bank senantiasa berusaha untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha Bank.

Bank telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko pada tahun 2004, yang secara garis besar mengemukakan tentang pedoman umum penerapan manajemen risiko. Kebijakan ini mengatur tentang tugas, tanggung jawab dan wewenang dari Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Manajemen Risiko, serta Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan kebijakan prosedur, penetapan limit, proses penerapan Manajemen Risiko, pengendalian internal dalam penerapan manajemen risiko, untuk masing-masing jenis risiko yang dihadapi oleh Bank. Persetujuan atas kebijakan Manajemen Risiko juga menunjukkan adanya keterlibatan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dalam penerapan Manajemen Risiko.

Secara garis besar, risiko-risiko utama yang dihadapi oleh Bank mencakup antara lain risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko kepatuhan dan risiko strategis.

Pada tahun 2010, Bank juga telah membentuk unit kerja manajemen risiko pasar untuk mengelola risiko pasar Bank.

Untuk lebih jelasnya, proses penerapan manajemen risiko yang telah dilakukan oleh Bank antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:

#### **4. The Implementation of Risk Management including Internal Control System**

*The Bank realizes that the development of the banking industry in this world has directly influenced the internal and external conditions of Bank's business activities. This has caused the increase of potential risk faced by the Bank. Therefore, the Bank always tries to implement effective risk management in accordance to the goals, business policies, size and complexity of Bank's business.*

*The Bank established the Risk Management Policy in 2004, which generally includes the general guidelines of risk management implementation. This policy regulates duties, responsibilities and authorities of the Board of Commissioners, Board of Directors, Risk Management Committee, Risk Management Unit, and procedure and policy, limit definition, implementation process of risk management, internal control in implementing risk management for each risk faced by the Bank. Establishment of Risk Management Policy indicates the active involvement of the Board of Commissioners and Board of Directors in risk management implementation.*

*In general, the main risks faced by the Bank are credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, reputational risk, compliance risk and strategic risk.*

*In 2010, the Bank had also established a market risk management unit to manage the Bank's market risk.*

*For further clarity, the process of risk management implementation that has been conducted by the Bank are as follows:*

**a) Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Dewan Direksi**

Sebagai salah satu bentuk upaya untuk mewujudkan pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, Bank telah menetapkan wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, terkait dengan penerapan manajemen risiko

Tugas dan wewenang Dewan Komisaris dalam kaitannya dengan penerapan Manajemen Risiko, tercermin dalam dokumen Pembagian Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, yang menyatakan dengan jelas, bahwa salah satu tugas utama Dewan Komisaris adalah untuk mengevaluasi dan memberikan persetujuan atas kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan, sehubungan dengan ketentuan yang berlaku, baik internal maupun eksternal, serta melakukan evaluasi atas pelaksanaan tanggung jawab manajemen risiko dan kepatuhan.

Satuan Kerja Manajemen Risiko sendiri, berusaha untuk senantiasa melibatkan serta memberikan informasi terkini atas risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank, dengan menyampaikan setiap risalah rapat Komite Manajemen Risiko yang diadakan sekali dalam sebulan, kepada Komite Pemantau Risiko serta anggota Dewan Komisaris.

Dalam rapat yang dilakukan secara bulanan ini, dikemukakan risiko-risiko terkini yang sedang dihadapi oleh Bank, termasuk di dalamnya, pembahasan atas risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko reputasi serta risiko hukum.

**a) Active supervision from the Board of Commissioners and Board of Directors**

*As one of the attempts to create an active supervision from Board of Commissioners and Board of Directors, the Bank has determined authorities and responsibilities of the Board of Commissioners and Board of Directors related to risk management implementation.*

*The duties and authorities of the Board of Commissioners in relation with the implementation of Risk Management is reflected in the document of Duties and Authorities of the Board of Commissioners, which states clearly that one of the main duties of the Board of Commissioners is to evaluate and give approval towards risk management and compliance policy, in accordance to the prevailing regulations, both internal and external, as well as to evaluate the execution of the duties of risk management and compliance.*

*The Risk Management Unit also makes its best efforts to participate and provide up to date information regarding any risk faced by the Bank by delivering every minutes of meeting of Risk Management Committee held once in a month, to the Risk Monitoring Committee and the members of Board of Commissioners.*

*In this monthly meeting, current risks faced by the Bank is discussed, including discussions on credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, compliance risk, reputation risk and legal risk.*

## **b) Penetapan Kebijakan Manajemen Risiko**

Bank memiliki kebijakan manajemen risiko dalam bentuk Standar Penerapan Manajemen Risiko, yang merupakan arahan tertulis dalam menerapkan manajemen risiko, yang disusun sejalan dengan visi, misi, dan rencana strategik Bank. Kebijakan ini disusun untuk masing-masing jenis risiko yang dihadapi oleh Bank, serta mempertimbangkan juga jenis produk dan transaksi perbankan yang disediakan oleh Bank.

Penetapan kebijakan manajemen risiko antara lain dilakukan dengan cara menetapkan strategi manajemen risiko, yang berusaha untuk memastikan bahwa:

- Bank tetap mempertahankan eksposur risiko yang sesuai dengan kebijakan, prosedur internal Bank, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.
- Bank dikelola oleh sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, pengalaman dan keahlian di bidang manajemen risiko, sesuai dengan kompleksitas dan kemampuan usaha Bank.

Untuk penetapan prosedur dan limit terkait dengan penerapan manajemen risiko, Bank sebagai salah satu anak perusahaan ANZ Group, menerapkan sebagian kebijakan manajemen risiko yang ditetapkan oleh ANZ Group. Meskipun demikian, Bank sebagai sebuah entitas legal yang beroperasi secara mandiri di Indonesia, tetap memperhatikan *risk appetite* Bank berdasarkan pengalaman yang dimilikinya dalam mengelola risiko yang spesifik dihadapi oleh Bank dalam hubungannya dengan lokasi operasional Bank di Indonesia, yang mungkin memiliki beberapa perbedaan dengan kondisi ANZ Group.

## **b) Establishment of Risk Management Policy**

*The Bank has established a risk management policy in the form of a written guideline in implementing risk management which was compiled in conjunction with the vision, mission, and strategic plans of the Bank. This policy was drafted for each type of risk faced by the Bank, and also takes into account the type of product and banking transaction provided by the Bank.*

*The establishment of risk management policy was done by defining risk management strategy to ensure that:*

- *The Bank maintains its risk exposure in accordance with its policy, internal procedures, and other prevailing regulations.*
- *Bank is managed by resources with sound knowledge, experience and skills in risk management area, in accordance to the complexity and capabilities of the Bank's business.*

*In determining procedures and limit related to risk management implementation, the Bank as one of ANZ Banking Group's subsidiaries, implements some parts of risk management policy defined by ANZ Group. However, the Bank as an Indonesian legal entity that operates solely in Indonesia, still takes into account its own risk appetite based on its experience in managing specific risks faced by a Bank in Indonesia that differs with the condition of the Group.*



Penetapan prosedur dan limit ini dilakukan untuk masing-masing jenis risiko dan terdokumentasi dalam kebijakan manajemen risiko. Sebagai contoh, untuk risiko kredit, Bank telah mengimplementasikan sebagian kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh ANZ Group, yaitu dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB). Limit kredit ditetapkan secara global oleh ANZ Group dalam rangka menerapkan pengelolaan risiko yang terukur dengan baik dan konsisten. Bank juga telah memiliki kerangka kebijakan manajemen likuiditas serta adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan likuiditas.

*The implementation of these procedures and limit are done for each type of risk and documented in risk management policy. For instance, for credit risk, the Bank has implemented some policies and procedures determined by the ANZ Group, known as the Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB). Credit limit is defined globally by ANZ Group in order to implement well measured and consistent risk management. Bank also has a liquidity management policy including segregation of duties and responsibilities in managing liquidity risk.*



Bank telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko pada tahun 2004, yang secara garis besar mengemukakan tentang pedoman umum penerapan manajemen risiko.

*The Bank established the Risk Management Policy in 2004, which generally includes the general guidelines of risk management implementation*

**c) Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko**

Bank melakukan proses identifikasi risiko dengan tujuan mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang memiliki potensi untuk merugikan Bank dan mengukur profil risiko Bank, guna memperoleh gambaran efektivitas penerapan manajemen risiko.

Pengukuran risiko ini dapat dilakukan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Pengukuran risiko oleh Bank dilakukan terhadap:

- Sensitivitas produk/ aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal;
- Kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi perubahan yang terjadi di masa lalu dan korelasinya;
- Faktor risiko (*risk factor*) secara individual;
- Eksposur risiko secara keseluruhan (*aggregate*), dengan mempertimbangkan korelasi risiko;
- Seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk Bank dan dapat diintegrasikan dalam sistem informasi manajemen Bank.

Penerapan pemantauan dan pengendalian risiko meliputi penetapan limit secara individual dan keseluruhan/konsolidasi. Penetapan limit dilakukan dengan memperhatikan kemampuan modal Bank untuk dapat menyerap eksposur risiko atau kerugian yang timbul, dan tinggi rendahnya eksposur Bank dengan mempertimbangkan pengalaman kerugian di masa lalu dan kemampuan sumber daya manusia. Satuan Kerja Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko dan Direksi wajib untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap limit-limit yang telah ditetapkan.

**c) The Adequacy of the Process of Risk Identification, Measurement, Monitoring and Controlling Process as well as Risk Management Information System**

*The Bank conducts risk identification process aimed at identifying all kinds of inherent risks in every functional activity that can inflict any potential loss to the Bank and to determine The Bank's risk profile in order to obtain a portrayal of the effectiveness of risk management implementation.*

*This risk measurement can be done quantitatively and qualitatively. The risk measurements are done by measuring :*

- *Sensitivity of products/activities on the changing of factors that influence them, both in normal and abnormal condition;*
- *Tendency of the changes in various factors based on the past fluctuation and its correlation;*
- *Individual risk factor;*
- *Aggregate risk exposure by taking into account risk correlation;*
- *All inherent risks on all Bank's transaction and products that can be integrated in the Bank's management information system.*

*The implementation of risk monitoring and controlling covers both individual and consolidated limit. The limit determination was established by taking into account the ability of Bank's capital to absorb risk exposure or the actual loss, and the level of Bank's exposure by taking into account past losses and also the capability of Bank's human resources. Risk Management Unit, Risk Management Committee and Directors are obliged to ensure the Bank's compliance towards the defined limits.*

Penetapan jenis limit meliputi:

- Limit transaksi;
- Limit mata uang;
- Limit volume transaksi;
- Limit posisi terbuka;
- Limit kerugian;
- Limit intra hari;
- Limit nasabah dan counterparty;
- Limit pihak terkait;
- Limit industri/sektor ekonomi dan wilayah

Penetapan limit dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, antara lain ketentuan tentang Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Posisi Devisa Neto (PDN).

Sistem informasi manajemen risiko wajib dimiliki oleh Bank, untuk menjamin:

- Terukurinya eksposur risiko secara akurat, informatif, dan tepat waktu, baik eksposur risiko secara keseluruhan/komposit maupun eksposur untuk masing-masing jenis risiko yang melekat pada kegiatan usaha Bank, serta eksposur risiko per jenis aktivitas fungsional Bank;
- Dipatuhinya penerapan manajemen risiko terhadap kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko;
- Tersedianya hasil (realisasi) penerapan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh Bank sesuai dengan kebijakan dan strategi penerapan manajemen risiko.

Dalam realisasinya, Sistem Informasi Manajemen Risiko yang dimiliki oleh Bank mengukur hampir semua jenis risiko, terutama karena ANZ Banking Group, sebagai pemegang saham mayoritas Bank, telah memiliki sarana dan prasarana yang sangat memadai dalam hal ini.

*Determination of limit types include:*

- *transaction/product limit;*
- *currency limit;*
- *turnover limit;*
- *open position limit;*
- *cut loss limit;*
- *intraday limit;*
- *individual borrower and counterparty limit;*
- *related parties limit;*
- *industry/economic sector and geographic limit*

*Limit determination is done by taking into account prevailing Bank Indonesia Regulations including Capital Adequacy Ration (CAR), Legal Lending Limit (LLL) and Net Open Position (NOP).*

*The Bank must have a risk management information system that can ensure that:*

- *The risk exposure is accurately, informatively, and timely measured, both for aggregate risk exposure and exposure for each type of inherent risk on Bank's business activity, and also risk exposure for each Bank's functional activity;*
- *Compliance with the implementation of risk management towards policy, procedures and risk limit definition;*
- *Availability of the result of risk management implementation compared to the determined target in line with policy and strategy of risk management implementation.*

*In its realization, risk management information system owned by the Bank measures all types of risk, especially because ANZ Banking Group, as a major shareholder, has owned instruments and tools which are sufficient for this purpose.*

Sementara itu, untuk risiko pasar dan risiko likuiditas, Bank telah menerapkan perhitungan VaR (*Value at Risk*) dan EaR (*Earning at Risk*) untuk mengukur dan memantau risiko pasar setiap harinya, serta model internal untuk mengukur kebutuhan kas dalam jangka waktu tertentu, yaitu model *Extreme Short-Term Crisis* (ESTC), *Short-Term Crisis* (STC) dan *Normal Business Condition* (NBC). Model ESTC merupakan skenario terburuk yang digunakan untuk memproyeksikan likuiditas hingga 14 hari ke depan. Model STC digunakan untuk memproyeksikan kebutuhan likuiditas 8 hari ke depan, sementara, model NBC digunakan untuk memproyeksi kebutuhan likuiditas sebulan ke depan.

Pada tahun 2010, Bank juga telah membentuk unit kerja manajemen risiko pasar untuk mengelola risiko pasar Bank.

#### **d) Sistem Pengendalian Internal**

Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen Bank dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional Bank yang sehat dan aman. Di samping itu, keberadaan SPI juga dipercaya untuk dapat digunakan sebagai sarana dari manajemen Bank untuk melakukan fungsi kustodian atas aset Bank, memastikan tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Bank telah menyusun Pedoman Standar Sistem Pengendalian Internal pada tanggal 18 Agustus 2005.

*Meanwhile, for market and liquidity risks, the Bank has implemented VaR (Value at Risk) and EaR (Earning at Risk) to measure and monitor daily market risk, and also internal model to measure cash needs in certain period, namely Extreme Short-Term Crisis (ESTC), Short-Term Crisis (STC) and Normal Business Condition (NBC). ESTC model is the worst scenario used to forecast liquidity needs for the next 14 days. STC model is used to forecast liquidity needs for the next 8 days, while NBC model is used to forecast liquidity needs for the next one month.*

*In 2010, the Bank also established a market risk management unit to manage the Bank's market risk.*

#### **d) Internal Controlling System**

*Effective Internal Control System (ICS) is an important component in the Bank's management and a foundation for Bank's sound and safe operational activities. Besides that, the existence of ICS is expected to be a tool of Bank's management to conduct custody function on Bank's assets, ensure the availability of reliable financial and managerial reports, improve compliance towards prevailing regulations and law, as well as reduce the risks of loss, deviation, and violation against prudential principles.*

*Referring to the Bank Indonesia stipulation, the Bank has established Standard Guidelines of Internal Control System on August 18, 2005.*

Pedoman yang dimiliki oleh Bank ini, terdiri dari lima elemen utama yang saling berkaitan, yaitu:

### **1. Pengawasan oleh Manajemen dan Kultur Pengendalian**

Pengawasan oleh manajemen dan kultur Pengendalian diwujudkan dalam bentuk keterlibatan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dalam memberikan persetujuan atas kebijakan dan strategi usaha Bank yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank, persetujuan yang diberikan oleh Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dalam setiap prosedur dan kebijakan yang disusun oleh masing-masing unit bisnis untuk memastikan efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional, serta penyusunan struktur organisasi yang mencerminkan kewenangan, tanggung jawab dan hubungan pelaporan yang jelas.

Proses pemantauan oleh Dewan Komisaris dan Direksi juga turut dilakukan melalui pelaporan temuan hasil audit oleh SKAI yang disampaikan secara berkala kepada Dewan Komisaris, serta penyampaian temuan hasil audit dalam rapat bulanan Dewan Direksi.

Identifikasi dan penilaian risiko telah dilakukan secara teratur oleh semua bisnis unit dengan dibantu oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko, dengan menyusun *Risk Register* untuk masing-masing unit bisnis Bank, baik yang berhubungan secara langsung dengan proses menghasilkan pendapatan (misalnya: *corporate banking, personal banking, treasury, credit card, trade finance*), maupun unit bisnis yang memberikan fungsi pendukung (misalnya: TI, Keuangan, Akunting, *payment service, treasury settlement, sumber daya manusia*).

Di dalam *risk register* ini, termuat risiko-risiko yang ada dalam suatu aktivitas bisnis, jenis dan sifat risiko yang dikategorikan berdasarkan kemungkinan terjadinya suatu risiko, efek yang ditimbulkan risiko itu bagi aktivitas bisnis Bank, serta sistem pengendalian yang telah ditempatkan untuk menghindari risiko tersebut.

Pada akhirnya, Satuan Kerja Manajemen Risiko berdasarkan *risk register* tersebut, akan menentukan prosedur pengecekan yang dilakukan secara berkala atas sistem pengendalian untuk memastikan efektivitas sistem tersebut.

*The guidelines owned by the Bank are composed of 5 basic elements related one to another, which are:*

### **1. Management Oversight and Control Culture**

*Management oversight and control culture is realized in a form of participation by the Board of Commissioners and Board of Directors in the approval of policy and strategy of Bank's business documented in the Bank's Business Plan, approvals given by Board of Commissioners and Board of Directors in every procedure and policy made by each business unit are needed to ensure efficiency and effectiveness of operational activities, and also establishing an organization structure that reflects authorities, responsibilities and clear reporting line.*

*Supervision process performed by the Board of Commissioners and Board of Directors is also done through reporting of audit result finding by Internal Audit reported on a regular basis to the Board of Commissioners, and the report of audit result finding in monthly Director's meeting.*

*Risk identification and assessment have been performed regularly by all business units with the assistance from Risk Management Unit, by the establishment of Risk Register, both for the ones which are directly connected to an income generated process (such as: corporate banking, personal banking, treasury, credit card, trade finance), and also support service business units (such as: IT, finance and accounting, payment service, treasury settlement, human resources).*

*In this risk register, risks are listed according to each business activity, type and characters of risk categorized based on the probability of occurrence of such risk or the effect that would emerge due to such risk to the Bank's business activity and control system that have been placed to prevent that risk.*

*Ultimately, Risk Management Unit based on mentioned risk register, will determine checking procedure to be done periodically in line with internal control system to ensure the effectiveness of the system.*

## 2. Identifikasi dan Penilaian Risiko

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, Bank, melalui masing-masing unit bisnis dengan bantuan Satuan Kerja Manajemen Risiko, telah mengidentifikasi kegiatan pengendalian untuk masing-masing aktivitas bisnis yang rentan terhadap adanya risiko.

Semua pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis Bank diharuskan untuk menerapkan dan memperhatikan kegiatan pengendalian dengan adanya kebijakan dan prosedur yang harus diimplementasikan. Kaji ulang atas efektivitas kegiatan pengendalian ini dilakukan secara berkala oleh SKAI, dengan melakukan pemeriksaan atas penilaian risiko (laporan profil risiko serta *risk register*) yang dihasilkan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko.

## 3. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi

Pemisahan fungsi, yang merupakan satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pengendalian, telah disadari oleh Bank, dengan menetapkan struktur organisasi yang memadai untuk mengakomodasi hal ini.

Sebagai contoh, terdapat pemisahan fungsi antara *treasury dealing room* (sebagai pihak yang melakukan inisiasi transaksi) dengan *treasury settlement* (sebagai pihak yang melakukan pembayaran transaksi), atau *relationship manager corporate banking* (pihak yang berhubungan langsung dengan calon debitur) dengan *credit analyst* (pihak yang berwenang melakukan analisa untuk pengambilan keputusan kredit) dan *loan administrator* (pihak yang berwenang untuk melakukan pengucuran dana). Hal yang sama juga berlaku untuk SKAI dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, sebagai satuan kerja yang bertugas untuk melakukan pemantauan sistem/kegiatan pengendalian di masing-masing unit bisnis, yang terpisah dan independen dari unit atau kegiatan operasional.

## 2. Risk Identification and Assessment

*As mentioned before, the Bank, through each business unit with assistance from Risk Management Unit, has identified activities of each business activity which are susceptible to risks.*

*All parties who participate in the Bank's business activities are obliged to implement and pay attention to how to control those risks in accordance with the existing policy and procedures. Review of the effectiveness of the control is done periodically by Internal Audit, by examination of the risk assessment (risk profile report and risk register) established by Risk Management Unit.*

## 3. Control Activities and Segregation of Duties

*Segregation of duties; a component that cannot be separated from control activities, has been understood by the Bank, by setting up an adequate organization structure to accommodate this need.*

*As an example, there is segregation of duty between treasury dealing room (as a party that initiates the transaction) with treasury settlement (as a party that executes the payment), or relationship manager corporate banking (as the party that deals directly with a potential client) with credit analyst (a party that analyze the credit worthiness of the client) and loan administrator (a party that executes the loan draw down). The same thing also prevails for Internal Audit and Risk Management Unit which are separate and independent from business unit or operational activities.*

Pemisahan fungsi ini dimaksudkan agar setiap karyawan dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya pada seluruh jenjang organisasi dan seluruh langkah kegiatan operasional. Prinsip pemisahan fungsi ini, juga dikenal sebagai "Four-Eyes Principle". Sistem Pengendalian Internal yang efektif mensyaratkan adanya pemisahan fungsi dan menghindari pemberian wewenang dan tanggung jawab yang dapat menimbulkan berbagai benturan kepentingan (*conflict of interest*). Seluruh aspek yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan tersebut harus diidentifikasi, diminimalisasi/dieliminasi, dan dipantau secara hati-hati.

#### **4. Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi**

Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi yang memadai dimaksudkan agar dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan digunakan sebagai sarana tukar menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

Bank telah berupaya untuk menyusun sistem akuntansi, informasi dan komunikasi yang memadai untuk mencapai tujuan tersebut di atas. Divisi Keuangan dan Akuntansi berkewajiban untuk mengirimkan posisi neraca Bank setiap hari, kepada pihak-pihak yang berkepentingan, lengkap dengan rasio-rasio likuiditas, modal, dan kepatuhan yang harus dipelihara oleh Bank.

Salah satu bentuk sistem informasi dan komunikasi juga dikembangkan dengan adanya sistem pemantauan media secara harian, baik media cetak maupun media elektronik, yang digunakan sebagai sarana untuk memantau pemberitaan positif dan negatif tentang Bank. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tindakan yang kiranya perlu, dapat segera diambil untuk mencegah timbulnya citra negatif.

*This segregation of duties is intended to eliminate the possibility of hiding mistakes or violation of duties in all organizational level as well as operational activities. This function of segregation principle is also known as "Four-Eyes Principle". The internal control system effectiveness requires function segregation and avoids authorities and responsibilities assignment that can lead to various conflicts of interest. All aspects that can lead to conflicts of interest have to be identified, minimized or eliminated, and supervised carefully.*

#### **4. Accounting, Information and Communication System**

*The adequacy of accounting system, information and communication system is intended to identify problems that might appear and be used as a tool of information exchange in conducting duties according to each and every responsibility.*

*The Bank has managed to arrange sufficient accounting, information and communication system to achieve the goal mentioned above. Finance and Accounting Division is responsible for delivering the Bank's balance position on a daily basis to all stakeholders, complete with liquidity, capital and compliance ratios that have to be maintained by the Bank.*

*A robust information and communication system has also been developed by the daily monitoring of both printed and electronic media, which are also used as a tool to monitor positive and negative news about the Bank. This is done to ensure that all necessary actions keep any negative perception in check as soon as possible.*

Bank juga memiliki sistem informasi terintegrasi dengan adanya situs MAX yang disediakan oleh ANZ Group untuk semua kantor cabang maupun anak perusahaannya, termasuk Bank. Sistem informasi ini berisi tentang kabar-kabar terbaru mengenai kondisi industri perbankan global, kebijakan dan prosedur, strategi bisnis, dan kondisi terkini dari ANZ Group.

Bank telah menyusun *Business Contingency Plan* (BCP) yang merupakan pedoman yang dapat digunakan oleh Bank untuk mengatasi kondisi darurat yang disebabkan oleh hal-hal yang tak terduga, seperti misalnya kebakaran dan bencana alam. Sebagai bagian dari BCP, Bank memiliki *Disaster Recovery Plan* (DRP), untuk menjaga agar informasi dan sistem yang dimiliki oleh Bank tetap dapat berfungsi dengan baik selama proses pemulihan setelah terjadinya kondisi darurat. Prosedur dan proses dari BCP ini telah didokumentasikan dan dimintakan persetujuannya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Bank, serta dinilai kembali efektivitasnya secara berkala. Untuk memastikan bahwa seluruh rencana dan proses pemulihan darurat dapat berjalan secara efektif maka pelaksanaan proses dan sistem tersebut diuji secara berkala (dua kali dalam setahun). Bank mendokumentasikan pelaksanaan pengujian berkala tersebut, dan menyampaikan hasilnya kepada ANZ Group, untuk dilakukan penilaian dan langkah perbaikan yang diperlukan.

##### **5. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan/Kelemahan**

Bank melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal. Pemantauan terhadap risiko utama Bank diprioritaskan dan berfungsi sebagai bagian dari kegiatan Bank sehari-hari, termasuk evaluasi secara berkala, baik oleh satuan-satuan kerja operasional, Satuan Kerja Manajemen Risiko, maupun oleh SKAI.

*The Bank also has an integrated information system called MAX which is a site provided by ANZ Group for all branch offices and subsidiaries, including the Bank. This information system consists of all updated news concerning global banking industry condition, policy and procedures, business strategy, and current condition of ANZ Group.*

*The Bank has arranged a Business Contingency Plan (BCP) which is a guideline that can be used by the Bank to handle emergency conditions which can be caused by fire or natural disaster. As a part of BCP, Bank has compiled a Disaster Recovery Plan (DRP), to keep any information and system owned by the Bank working well during the process of recovery after the an emergency. The procedure and process of this BCP was documented and approved by the Board of Commissioner and Directors of the Bank and its effectiveness will be assessed periodically. To assure that all plans and processes of emergency recovery can run effectively, the execution of the process and system will be tested periodically (twice in a year). Bank documents the implementation of that periodic assessment, and delivers the result to ANZ Group, which will assess and determine any corrective actions that need to be taken.*

##### **5. Monitoring Activities and Correcting Deficiencies**

*The Bank conducts monitoring activities and continuously correct deficiencies which affect the effectiveness of the Bank's internal control. Monitoring of Bank's main risks is prioritized and works as a part of the Bank's daily activities, including periodic evaluation, both by all operational units, Risk Management Unit and also by Internal Audit.*



Hasil dari pemantauan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko serta SKAI akan memberikan rekomendasi dan tindakan koreksi yang harus diambil untuk memastikan efektivitas pengendalian. Hasil ini juga akan disampaikan oleh kedua satuan kerja tersebut di atas melalui rapat bulanan Dewan Direksi, rapat Komite Manajemen Risiko, serta penyampaian laporan tertulis kepada Dewan Komisaris. Hal ini dilakukan untuk melibatkan Dewan Komisaris dan Direksi dalam melakukan fungsi pemantauan.

Terkait dengan manajemen risiko reputasi, Bank menyadari bahwa kepuasan nasabah adalah esensial untuk menopang pertumbuhan usaha Bank, oleh karenanya setiap keluhan dan pengaduan nasabah ditanggapi dengan serius dan ditindaklanjuti oleh Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia dan ketentuan internal Bank.

Bank telah memiliki prosedur tata kelola yang berjalan dengan baik untuk mengelola keluhan dan pengaduan nasabah. Unit organisasi yang didekasikan untuk mengelola keluhan dan pengaduan nasabah adalah Unit *Customer Care*. Bank juga menginformasikan kepada seluruh nasabah mengenai infrastruktur Bank yang dapat digunakan oleh nasabah untuk menyampaikan keluhan dan pengaduan, yaitu dengan cara mendatangi secara langsung kantor cabang Bank pada jam kerja, melalui Relationship Manager, penyampaian secara tertulis melalui faksimili, surat elektronik maupun *homepage* Bank, serta melalui kanal telepon khusus. Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi juga berjalan dengan baik, masing-masing melalui organ Komite Pemantau Risiko dan Komite Manajemen Risiko Operasional di mana keluhan dan pengaduan nasabah menjadi salah satu topik bahasan dalam pertemuan komite-komite tersebut.

Bank telah menetapkan kebijakan dan prosedur penyelesaian nasabah dengan Perjanjian Tingkat Layanan (*service level agreement*) yang ditetapkan dengan mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia.

Bank juga memiliki sistem untuk mencatat, memonitor dan menghasilkan laporan pengaduan dan keluhan nasabah.

*The result of monitoring done by Risk Management Unit and Internal Audit Unit will include recommendation and corrective actions that need to be taken to ensure control effectiveness. This result is also delivered by both business units through Board of Directors Monthly meeting, Risk Management Committee meeting, whilst a written report is also submitted to the Board of Commissioners. This is done to involve Board of Commissioners and Directors in conducting monitoring functions.*

*Related to reputation risk management, the Bank realizes that customer satisfaction is essential to sustain the growth of the Bank's business. Therefore, all customer complaints are taken seriously and acted upon by the Bank in accordance with Bank Indonesia and the Bank's internal regulations.*

*The Bank has governance procedures in place to manage customer complaints. The organizational unit dedicated to managing customer complaints is the Customer Care Unit. Bank also informs all customers about Bank's infrastructure that can be used by customers to lodge a complaint, such as directly visiting the Bank's branch offices during business hours, through the Relationship Manager, submission in writing via fax, mail or homepage of the Bank, as well as through a special telephone line. Supervisory functions of the Board of Commissioners and Board of Directors are also operating well, each through the Risk Oversight Committee and Operational Risk Management Committee, respectively in which customer complaints is a topic of discussion in the meetings of these committees.*

*The Bank has established policies and procedures for settlement of customer complaints with Service Level Agreements guided by Bank Indonesia regulations.*

*The Bank also has a system to record, monitor and generate reports on customer complaints.*

Jumlah keluhan nasabah dimonitor oleh manajemen dan dianalisa untuk dapat memperoleh perbaikan proses atau sistem untuk meningkatkan kepuasan nasabah. Sebagai contoh, Bank memperkenalkan layanan *electronic statement* untuk memitigasi pengaduan dan keluhan terkait dengan lembar tagihan yang terlambat diterima oleh nasabah.

Pada tahun 2013, Bank menerima 14,202 pengaduan dan keluhan, dimana menunjukkan penurunan dibandingkan 15,890 pengaduan dan keluhan selama tahun 2012.

Sebagai bukti keberhasilan manajemen dalam meningkatkan layanan kepada nasabah, Bank berhasil memperoleh penghargaan:

1. **18 Maret 2013:** *Service to Care Award 2013* dari MarkPlus Insight sebagai *"Indonesia Service to Care Champion 2013"* untuk kategori tabungan perbankan konvensional dengan aset di bawah Rp 75 triliun.
2. **4 Juni 2013:** Bank Terbaik 2013 untuk kategori bank dengan aset Rp 25-100 triliun dari majalah terkemuka di Indonesia, Majalah Investor.
3. **5 Juli 2013:** memenangkan predikat "Sangat Bagus" untuk kategori bank umum menurut kegiatan usaha (BUKU) 2 dengan modal inti sebesar Rp 1-5 triliun dari Majalah Infobank.
4. **26 September 2013:** Anugerah Perbankan Indonesia 2013 dari Majalah Economic Review sebagai bank terbaik 2013 dengan modal inti Rp 1-5 triliun untuk dua kategori, yaitu Marketing dan Risk Management.

*The number of customer complaints are monitored and analyzed by the management in order to ensure process and system improvement further enhances customer satisfaction. For example, the Bank introduced electronic statement services to mitigate complaints from customers related to the delay of customer billing statement receipt.*

*In 2013, the Bank received 14,202 complaints and grievances, which shows reduction compared to 15,890 complaints during 2012.*

*As evidence of the success of management in improving service to customers, the Bank successfully obtained the following awards:*

1. **18 March 2013:** *Services Quality to Care Award 2013* from MarkPlus Insight as *"Indonesia Service to Care Champion 2013"* in Saving Account of Conventional Banking with Assets under IDR 75 Trillion category.
2. **4 June 2013:** *2013 Best Bank* from a leading publication in Indonesia, Investor Magazine, for the category of banks with the assets of IDR 25-100 trillion.
3. **5 July 2013:** won the predicate "Very Good" in the category of Commercial Bank According to Business Activity (BUKU) 2 – banks with a core capital of IDR 1 to 5 trillion from Infobank Magazine.
4. **26 September 2013:** Anugerah Perbankan Indonesia (Indonesian Banking Awards) 2013 from Economic Review magazine as Best Bank 2013 with the core capital of IDR 1-5 trillion for two categories, Marketing and Risk Management.

## 5. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Jumlah total baki debit penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan debitur/group inti per posisi laporan adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Penyediaan Dana/ Funding Exposure	Jumlah/Total	
	Debitur/ Debtor	Nominal/Nominal (dalam jutaan Rp/in mio Rp)
Pihak Terkait/ Related Parties	39	21,309.98
Debitur Inti/Core Debtor		
a. Individu/Individual	32	6,532,209.91
b. Grup/Group	18	4,960,081.90

Terkait dengan penyediaan dana atau penyaluran kredit ke debitur besar atau debitur tertentu, hal ini sesuai dengan karakteristik Bank sebagai bank campuran dan fokus Bank untuk menyediakan dana atau menyalurkan kredit ke nasabah korporasi.

Namun demikian, Bank tetap mengedepankan asas kehati-hatian (*prudential principle*) dalam penyaluran kredit dengan bertindak selektif untuk memilih debitur, dimana hanya debitur dan kelompok debitur tertentu pada bidang usaha tertentu yang memenuhi *risk appetite* Bank yang akan dapat menjadi debitur Bank.

Saat ini terdapat penyaluran kredit dalam jumlah besar yang melebihi batas maksimum pemberian kredit yang didukung dengan *stand by letter of credit* (SBLC) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Bank telah memperhatikan dan menjalankan petunjuk Bank Indonesia bahwa dukungan SBLC tersebut hanya tetap dilakukan kepada nasabah yang sebelumnya telah berada dalam pengaturan tersebut.

Manajemen Bank berkeyakinan bahwa dengan terus meningkatnya jumlah kredit yang disalurkan Bank, maka proporsi kredit yang didukung oleh SBLC akan semakin mengecil.

Manajemen juga berkeyakinan bahwa modal Bank saat ini pada tingkat yang tepat dan efisien guna mendukung pertumbuhan bisnis Bank, serta telah sesuai dengan target kisaran Bank antara 13% - 15%.

## 5. Funding Exposure to Related Party and Large Funding Exposure

The total of debit bucket of funding exposure to related party and core debtors/group per report position is as in the table below:

In relation with lending to certain debtors or large debtors, this is in accordance with the Bank's characteristic as a joint venture bank and the Bank's focus to provide lending to corporate customers.

However, the Bank maintains prudential principle in lending by acting diligently in debtor selection, in which only debtors and certain group of debtors in certain sectors meeting the Bank's risk appetite that will be able to be Bank's debtor.

Currently, there are loans in large amount exceeding the legal lending limit that are supported by standby letter of credit (SBLC) and in compliance with Bank Indonesia regulations. The Bank has paid attention and keeps following Bank Indonesia guidance that the SBLC support only applied to customers who have previously been in such arrangement.

The Bank's management believes that with the increasing number of loans, the proportion of the said loans supported with SBLC will gradually decrease.

The Management also believes that the Bank's current capital is at a level that is appropriate and efficient to support the business growth of the Bank, as well as in accordance with the Bank's targeted range of between 13% - 15%.

Namun demikian, jika terdapat kebutuhan tambahan modal, maka manajemen Bank akan mengajukannya kepada para pemegang saham.

Indonesia merupakan salah satu pasar kunci di Asia yang mendukung ANZ Group mewujudkan aspirasinya menjadi Super Regional Bank, sehingga ANZ Group memiliki komitmen untuk terus menumbuhkan bisnisnya di Indonesia. Panin Bank selaku pemegang saham minoritas merupakan bank terbesar ke-7 di Indonesia juga memiliki komitmen untuk mendukung pertumbuhan bisnis Bank.

## 6. Rencana Strategik Bank

ANZ Indonesia memposisikan diri sebagai bank campuran terkemuka dengan area utama pada perbankan korporasi dan ritel, termasuk kartu kredit dan pinjaman personal. ANZ adalah salah satu bank yang terkemuka di dunia pada bidang sumber daya alam dengan kapabilitas yang kuat dalam pertambangan, agribisnis dan perbankan komersial domestik dengan rangkaian produk yang lengkap, mencakup produk pinjaman, *trade finance*, manajemen kas dan treasuri. Untuk perbankan ritel, ANZ Indonesia akan mengarah menjadi yang terkemuka di pasar dalam bisnis perbankan dengan orientasi pada pelayanan kepada nasabah dan berfokus di *wealth management*, perbankan personal dan kartu kredit.

Filosofi kami adalah mengutamakan hubungan jangka panjang dengan nasabah kami daripada pendekatan yang hanya berorientasi pada transaksi. Kami berkeyakinan bahwa pendekatan yang mengutamakan hubungan dengan nasabah adalah pendekatan yang paling berkesinambungan dalam menambah *value* bagi nasabah kami.

Sebagai bagian dari akuisisi bisnis tertentu the Royal Bank of Scotland/RBS (eks ABN Amro Bank), pada Juni 2010 Bank mulai memiliki unit bisnis perbankan komersial.

Sesuai arahan Bank Indonesia dan komitmen Bank untuk mendukung peranan industri perbankan dalam pembangunan perekonomian Indonesia, maka Bank mendukung pengembangan sektor UKM dengan mulai meluncurkan kembali kredit ke sektor UKM segmen tertentu sesuai dengan keahlian dan *risk appetite* Bank pada Oktober 2012.

*However, if there is a need for additional capital, the Bank's management will propose additional capital injection to the shareholders.*

*Indonesia is one of the key markets in Asia which supports the ANZ Group to realize its aspirations to become a Super Regional Bank. Therefore, ANZ Group has a commitment to continue growing its business in Indonesia. Panin Bank as the minority shareholder of the Bank is the 7<sup>th</sup> largest bank in Indonesia, also has a commitment to support the growth of the Bank's business.*

## 6. Bank's Strategic Plan

*ANZ in Indonesia is positioning itself as one of the market leading joint-venture banks in the core areas of Corporate Banking and Retail Banking including Credit Cards and Personal Loan. ANZ is one of the world's leading natural resources banks with strong capabilities in mining, commercial agriculture, infrastructure and domestic commercial banking with the full range of lending, trade, cash management and treasury products. In retail banking, ANZ in Indonesia will have a market leading client service oriented business with a focus on wealth management, personal banking and credit cards.*

*Our philosophy is to build long-term relationships with our clients rather than a transaction oriented approach. We strongly believe that a relationship oriented approach is the most sustainable approach to adding value to our clients.*

*As part of the acquisition of certain businesses of the Royal Bank of Scotland / RBS (former ABN Amro Bank), in June 2010, the Bank began to have a commercial banking business unit.*

*As directed by Bank Indonesia and the Bank's commitment to support the role of the banking industry in the development of the Indonesian economy, the Bank supports the development of the SME sector by re-launching credit to customers at certain segments that meets Bank Indonesia definition of the SME sector, in accordance with the Bank's expertise and risk appetite, in October 2012.*



Dalam mengucurkan kredit ke sektor usaha kecil dan menengah (UKM), Bank juga mengembangkan infrastruktur pendukung, termasuk di antaranya adalah pemberdayaan kantor cabang dalam pemasaran, penilaian dan pemutusan kredit, serta pemeliharaan dokumen kredit dan monitoring kinerja kredit ke sektor UKM tersebut.

Target tahun 2013 yang ditetapkan oleh Bank antara lain adalah:

- a. Menjaga tingkat CAR pada level 13% – 15%.
- b. Peningkatan aset produktif sebesar 20%.
- c. Rasio kredit yang diberikan terhadap aset produktif Bank pada tahun 2013 diproyeksikan sebesar 78.37%.
- d. Pertumbuhan kredit perdagangan diproyeksikan akan meningkat sejumlah 41% sedangkan kredit non perdagangan diproyeksikan akan meningkat sejumlah 31%.

*In providing loans to the small and medium enterprise (SME) sector, the Bank is also developing supporting infrastructure, including empowerment of branch offices in marketing, appraisal and loan approval, as well as maintenance of loan documents and monitoring the credit performance of the SME sector.*

*The targets set by the Bank in 2013, among others, are:*

- a. Maintaining the CAR level at 13% – 15%.*
- b. A 20 % increase of its productive assets.*
- c. Ratio of loans given against the Bank's productive assets is projected at 78,37% in 2013.*
- d. Trade loan growth is projected to increase by 41% whilst non-trade loans are projected to increase by 31%.*

## **7. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan Bank yang belum Diungkap dalam Laporan Lainnya.**

Terkait dengan adanya perubahan komposisi pemegang saham dan perubahan struktur modal Bank tersebut, Bank telah menatausahakan pergantian nama dari PT ANZ Panin Bank menjadi PT Bank ANZ Indonesia, yang mana telah disetujui oleh Gubernur Bank Indonesia tertanggal 29 Desember 2011.

Bank telah mengubah nama menjadi PT Bank ANZ Indonesia secara efektif pada 12 Januari 2013 dan mempublikasikan perihal perubahan nama tersebut kepada publik melalui media massa serta melaporkannya ke Bank Indonesia pada tanggal yang sama.

Pada bulan Juni 2011, Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing V telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Ketetapan Pajak Lebih bayar (SKPLB) atas pemeriksaan pajak tahun pajak 2009. Pemeriksaan pajak tahun pajak 2009 dilakukan karena Bank mempunyai kelebihan pembayaran pajak penghasilan pasal 25 sebesar Rp. 44,7 miliar. Atas hasil pemeriksaan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing V tersebut, Bank telah mengajukan keberatan kepada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing V melalui surat keberatan tertanggal 20 September 2011 yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing V pada tanggal 22 September 2011.

## **7. The Transparency of Financial and Non-Financial Condition which have not been Disclosed in Other Reports.**

*With respect to the changes in the composition of shareholders and the Bank's capital structure, the Bank has administrated the change of name from PT ANZ Panin Bank to PT Bank ANZ Indonesia, which has been approved by the Governor of Bank Indonesia on 29 December 2011.*

*The Bank has effectively changed its name to PT Bank ANZ Indonesia on 12 January 2013 and published the name change to the public through the mass media also reported to Bank Indonesia on the same date.*

*In June 2011, the Taxation Service Office for Foreign Capital Investment V issued a Tax Underpayment Assessment Letter (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar – SKPKB) and Tax Overpayment Assessment Letter (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar – SKPLB) for the tax assessment in tax year 2009. The Tax Assessment in tax year 2009 was conducted due to tax overpayment by the Bank for income tax in Article 25 for Rp. 44.7 billions. For the assessment result issued by the Taxation Service Office for Foreign Capital Investment V, the Bank had submitted an objection to the Taxation Service Office for Foreign Capital Investment V through an objection letter dated 20 September 2011 submitted to the Taxation Service Office for Foreign Capital Investment V on 22 September 2011.*

Pada tanggal 18 September 2012, Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu menerbitkan surat keputusan keberatan yang menerima sebagian permohonan keberatan yang disampaikan oleh Bank. Kantor pelayanan pajak telah menerima permohonan keberatan atas pajak penghasilan badan sebesar Rp. 41,5 miliar. Atas keputusan keberatan PPh Pasal 23 dan PPh final, Bank mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak. Pada saat ini proses permohonan banding sedang berlangsung.

*On 18 September 2012, Large Taxpayer Office issued tax objection assessments which accepted partially our tax objection request. The tax office has approved Bank's tax objection request of IDR 41,4 bio. For remaining tax objection assessments, the Bank is requesting for tax appeal to Tax Court. Currently the tax appeal process is still ongoing.*



## B. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi

Tidak terdapat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank dengan kepemilikan saham lebih dari 5%, atas Bank, bank lain, lembaga keuangan bukan bank, maupun perusahaan lainnya, baik yang berlokasi di luar negeri maupun dalam negeri. Rincian atas hal tersebut adalah sebagai berikut:

## B. Share Ownership by Members of Board of Commissioners and Board of Directors

The members of Board of Commissioners and Directors do not have share more than 5% on behalf of Bank, other banks, non-bank financial institution, or other companies, both located overseas or in-country. The details are as follows:

Nama/ Name	Kepemilikan saham yang lebih dari 5%/ >5% ownership of shares							
	A		B		C		D	
	I	L	I	L	I	L	I	L
Enrique V. Bernardo	-	-	-	-	-	-	-	-
Bill Foo Say Mui	-	-	-	-	-	-	-	-
Jusuf Arbiyanto Tjondrolukito	-	-	-	-	-	-	-	-
Anies Rasyid Baswedan	-	-	-	-	-	-	-	-
Joseph Abraham	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajay Surendra Mathur	-	-	-	-	-	-	-	-
Sity Leo Samudera <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamadian Rostian	-	-	-	-	-	-	-	-
Martin Mulwanto <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
Soewandy <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
Luskito Hambali	-	-	-	-	-	-	-	-

### Catatan:

- A : PT Bank ANZ Indonesia
- B : Bank lain
- C : Lembaga Keuangan Bukan Bank
- D : Perusahaan lainnya
- I : Indonesia
- L : Luar negeri

### Notes:

- A : PT Bank ANZ Indonesia
- B : other banks
- C : non-bank financial institution
- D : other companies
- I : Indonesian
- L : Luar negeri/Abroad

1. Per tanggal 4 Juni 2013, Bank Indonesia menyetujui pengangkatan Sity Leo Samudera sebagai Direktur Institutional Banking.
2. Per tanggal 24 Maret 2014, Martin Mulwanto mengundurkan diri dari jabatan sebagai Direktur Treasuri yang disetujui pemegang saham Bank melalui Sirkuler Resolusi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank ANZ Indonesia tertanggal 27 Maret 2014.
3. Per tanggal 29 April 2013, Anthony Soewandy mengundurkan diri dari jabatan sebagai Direktur Perbankan Ritel yang disetujui pemegang saham Bank melalui Sirkuler Resolusi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank ANZ Indonesia tertanggal 18 Juli 2013.

1. Effective June 4, 2013, Bank Indonesia has approved the appointment of Sity Leo Samudera as Director of Institutional Banking.
2. On 24 March 2014, Martin Mulwanto resigned as Director of Treasury which was then approved by Bank's shareholders through Circular Resolution of General Meeting of Shareholders PT Bank ANZ Indonesia dated 27 March 2014.
3. On 29 April 2013, Anthony Soewandy resigned as Director of Retail Banking which was then approved by Bank's shareholders through Circular Resolution of General Meeting of Shareholders PT Bank ANZ Indonesia dated 18 July 2013.



### C. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris Lainnya, Dewan Direksi Lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank

Seluruh anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris tidak saling memiliki baik hubungan keuangan maupun hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.

Selain itu, komposisi Dewan Komisaris telah memenuhi syarat 50% komisaris independen. Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk dapat mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih obyektif dan menempatkan kewajaran (*fairness*) serta kesetaraan di antara berbagai kepentingan. Selaku Komisaris Independen dan Pihak Independen, mereka harus dapat terlepas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).

### D. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi

Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

### C. Financial and Family Relationships among Members of Board of Commissioners and Board of Directors with Other Members and/or with Controlling Shareholders

All members of the Board of Directors and Commissioners do not have any financial or family relationships among members of Board of Directors and/or among members of Board of Directors.

In addition, independent commissioners comprised 50% of the Board of Commissioners. The existence of Independent Commissioners is intended to create an objective and fair working environment and equality among various interests. As Independent Commissioners and Independent Parties, they are less likely to have and must be free of conflict of interest.

### D. Remuneration and other facilities package/policy for Board of Commissioners and Board of Directors

Remuneration and other facilities package/policy for Board of Commissioners and Directors is as follows:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain/ Types of Remuneration and Other Facilities	Jumlah Diterima dalam Satu Tahun/ Total Amount Received in One Year			
	Dewan Komisaris/ Board of Commissioners		Dewan Direksi/ Board of Directors	
	Orang/ Person	Jutaan Rupiah/ in million Rupiah	Orang/ Person	Jutaan Rupiah/ in million Rupiah
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)/ Remuneration (salary, bonus, routine allowances, tantiem and other facilities in the form of non in kind)	4	2,181	7	32,006
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) dalam ekuivalen Rupiah / Other facilities in the form of in kind (housing, transportation, medical insurance etc.) which:				
a. dapat dimiliki/can be owned				
b. tidak dapat dimiliki/can not be owned				
- perumahan/residence			2	1,826
- transportasi/transportation			2	413
- asuransi/insurance			7	482
Jumlah/Total	4	2,181	7	34,727

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, adalah sebagai berikut:

The number of members of Board of Commissioners and Board of Directors who receive remuneration package in a year are grouped according to the range of income, as follows:

Jumlah remunerasi per orang dalam 1 tahun yang diterima secara tunai/Total annual remuneration per person	Jumlah Direksi/ Total Directors	Jumlah Komisaris/ Total Commissioners
Di atas Rp 2 miliar/ Above IDR 2 billion	4	-
Di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar/ Above IDR 1 billion up to IDR 2 billion	3	-
Di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar/ Above IDR 500 million up to IDR 1 billion	-	1
Di bawah Rp 500 juta/ Below IDR 500 million	-	3

### E. Opsi Saham

Tidak terdapat *shares option* yang diberikan oleh Bank kepada anggota Dewan Komisaris, Dewan Direksi maupun Pejabat Eksekutif Bank.

### E. Shares Option

There is no shares option given by Bank to members of Board of Commissioners and Directors as well as Bank's Executive Officers.

### F. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah dengan pembandingan imbalan yang diterima per bulan adalah sebagai berikut:

1. rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 95.57 : 1
2. rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 5.36 : 1
3. rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 3.9 : 1
4. rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 3.37 : 1

### F. The Highest and Lowest Salary Ratios

The highest and lowest salary ratios with allowance as the standard of comparison taken each month is as follows:

1. the ratio of highest and lowest employee salary is 95.57 : 1
2. the ratio of highest and lowest director salary is 5.36 : 1
3. the ratio of highest and lowest Commissioner salary is 3.9 : 1
4. the ratio of highest salary Director and highest salary employee is 3.37 : 1

### G. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2013, Dewan Komisaris mengadakan 5 (lima) rapat dengan rincian dan kehadiran Komisaris sebagai berikut:

### G. The Frequency of Board of Commissioner Meeting

Throughout 2013, the Board of Commissioner held 5 (five) meetings with the details and attendance of Commissioner members as follows:

Nama/Name	Rapat I/ Meeting I 22 January 2013	Rapat II/ Meeting II 3 April 2013	Rapat III/ Meeting III 25 June 2013	Rapat IV/ Meeting IV 6 September 2013	Rapat V/ Meeting V 25 November 2013	Kehadiran/ Attendance
Enrique V Bernardo	Hadir/ Attend	Hadir/ Attend	Hadir/ Attend (Teleconference)	Hadir/ Attend	Hadir/ Attend	100%
Bill Foo Say Mui	Hadir/ Attend	Hadir/ Attend	Hadir/ Attend	Hadir/ Attend	Hadir/ Attend (Teleconference)	100%
Jusuf Arbianto Tjondrolukito	Hadir/ Attend	Hadir/ Attend	Hadir/ Attend	Hadir/ Attend	Hadir/ Attend	100%
Anies Rasyid Baswedan	Hadir/ Attend	Tidak Hadir/Absent	Hadir/ Attend	Hadir/ Attend	Hadir/ Attend	80%

## H. Jumlah Penyimpangan Internal (*internal fraud*)

Terdapat tiga kasus insiden *fraud* terjadi selama 2013. Ketiga kasus tersebut terkait dengan pemindahan data hak intelektual milik Bank ke *e-mail* pribadi milik tersangka atau *e-mail* di luar ANZ. Terkait dengan ketiga kasus tersebut, tidak ada kerugian finansial atau risiko yang berdampak negatif terhadap bank.

Untuk pencegahan dan pemberantasan *fraud*, Bank telah mengimplementasikan keempat pilar Bank Indonesia sesuai Surat Edaran no. 13/28/DPNP, yaitu pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan, sanksi, dan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut. Program seperti pelatihan *fraud awareness*, Audit Internal, *Quality Assessment*, *Know Your Employee*, *tone of the top* dan komitmen manajemen senior melalui *e-mail* kepada seluruh karyawan sudah dijalankan secara rutin.

## H. The Number of Internal Fraud

There were three cases of fraud incidents which occurred during 2013. Those cases were related to the Bank's intellectual property data that was transferred to suspect's private e-mails or non ANZ e-mail. However, there are no financial losses or negative impact to the bank caused by these incidents.

For the fraud prevention and eradication, the Bank has implemented the four pillars of Bank Indonesia in accordance with Bank Indonesia Circular Letter no. 13/28/DPNP, i.e. prevention, detection, investigation, reporting, sanctions, and monitoring, evaluation and follow-up. Programs such as fraud awareness training, Internal Audit, Quality Assessment, KYE, the tone of the top and senior management commitment via e-mail blast to all employees have been performed regularly.

Internal Fraud dalam 1 tahun/ Internal Fraud Case in One Year	Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh/ Total Cases Caused By					
	Pengurus/ Management		Pegawai Tetap/ Permanent Employees		Pegawai Tidak Tetap/ Non-Permanent Employees	
	Tahun Sebelumnya/ Previous Year	Tahun Berjalan/ Current Year	Tahun Sebelumnya/ Previous Year	Tahun Berjalan/ Current Year	Tahun Sebelumnya/ Previous Year	Tahun Berjalan/ Current Year
Jumlah Fraud/ Total Fraud Cases	-	1	11	2	14	-
Telah diselesaikan/ Resolved	-	1	11	2	12	-
Dalam proses penyelesaian internal Bank/ In the Process of resolution internally within the Bank	-	-	-	-	1	-
Belum diupayakan penyelesaiannya/ Resolution have not been carried out	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum/ Pursued legal process	-	-	-	-	1	-

## I. Permasalahan Hukum

Tidak terdapat permasalahan hukum yang masih berjalan hingga akhir tahun 2013.

## I. Legal Issues

There is no outstanding lawsuit in the year end 2013.

Permasalahan Hukum/ Legal Cases	Perdata/ Civil	Pidana/ Criminal
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)/ Resolved (with firm legal bases)	1	-
Dalam proses penyelesaian/ In the process of resolution	-	-
Total	1	-

#### **J. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan**

ANZ telah memiliki kebijakan mengenai pedoman perilaku yang diterapkan kepada Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan ANZ. Pedoman ini berfungsi sebagai landasan perilaku yang pada akhirnya mencegah terjadinya benturan kepentingan bagi seluruh karyawan ANZ. Kebijakan ini telah disosialisasikan pada saat penerimaan karyawan baru dan juga terdapat dalam Peraturan Perusahaan yang dibagikan ke setiap karyawan.

Selama ini Bank belum pernah menghadapi kondisi yang berhubungan dengan benturan kepentingan.

#### **K. Buyback Saham dan Buyback Obligasi Bank**

Bank tidak menerbitkan obligasi dan tidak pernah melakukan kegiatan *buyback saham*.

#### **L. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik selama Periode Pelaporan**

Bank tidak pernah terlibat dalam pemberian dana untuk menyokong kegiatan politik.

Sementara itu, untuk kegiatan sosial, selama tahun 2013 Bank melakukan kegiatan sosial sebagai perwujudan dari program tanggung jawab sosial kepada masyarakat melalui kegiatan program edukasi keuangan MoneyMinded dalam bentuk fasilitasi kepada masyarakat yang bekerja-sama dengan sejumlah organisasi nirlaba, antara lain YCAB (Yayasan Cinta Anak Bangsa) dan The Learning Farm, penyaluran dana beasiswa melalui The Learning Farm, pembangunan Rumah Belajar, sosialisasi program Ayo ke Bank yang ditujukan kepada anak dari karyawan maupun nasabah Bank, dan program sukarelawan yang melibatkan karyawan Bank yang bekerja-sama dengan sejumlah organisasi nirlaba. Bank juga menyalurkan bantuan tanggap bencana untuk korban banjir,

#### **I. Transaction that Contains Conflict of Interest**

*ANZ has made a policy concerning behavior guidelines for all Commissioners, Directors and all employees of ANZ. This guideline is intended to provide a foundation for the behaviours that will prevent any conflicts of interest for all employees of ANZ. This policy is socialized when new employees enter the bank and it is also inserted in the Company Regulation booklet given to every employee.*

*Until now, the Bank has not encountered conflict of interest issues.*

#### **J. Buyback Shares and Buyback Obligation of Bank**

*The Bank does not issue obligation and never conducts buyback shares activities.*

#### **L. Fund Granting for Social and Political Activities during Reporting Period**

*The Bank has never been involved in financing any political activities.*

*Meanwhile, for social activities, during 2012 the Bank performed social activities as a form of corporate social responsibility for the community through the Money Minded financial literacy activities. These were conducted by facilitating activities for the public and in cooperation with non-profit organizations, among others YCAB and The Learning Farm. The programs include scholarships through The Learning Farm, establishment of Rumah Belajar, Ayo ke Bank (Come to the Bank) program dissemination for children of Bank employees and customers, as well as volunteer programs for employees in cooperation with non-profit organizations. The Bank also donated disaster relief fund for the flood victims.*

Berikut kami sampaikan rincian kegiatan sosial Bank selama tahun 2013:

The details of the Bank's social events during the year 2013 are as follows:

Aktivitas CSR 2013/ CSR Activities 2013	Tanggal/ Date	Jumlah Donasi (Rupiah)/ Cost (IDR)	Kegiatan CSR/CSR Activities
Program Tanggap Bencana/ Disaster Relief Program	January 2013	USD \$200,000	Bulan Januari 2013, ANZ mendonasikan USD \$200.000 melalui Palang Merah Indonesia (PMI) sebagai bentuk tanggap bencana banjir di Jakarta. Donasi tersebut akan digunakan untuk memberikan dukungan terhadap upaya penanganan bencana dengan menyediakan air bersih yang akan didistribusikan oleh mobil tangki air ke daerah-daerah yang paling terkena dampak di Jakarta, untuk distribusi lebih lanjut terhadap korban-korban banjir di Jakarta/ <i>In January 2013, ANZ donated USD \$200,000 through the Red Cross Indonesia (PMI) as a form of response to floods in Jakarta. The donation will be used to provide support for disaster relief efforts to provide clean water to be distributed by water tankers to areas most affected in Jakarta, for further distribution to flood victims in Jakarta.</i>
Program Kesetaraan Kesempatan Kerja/ Equal Employment Opportunity Program	January - December 2013		Program mendukung tuna netra melalui Yayasan Mitra Netra dimana beberapa anggota didikan Yayasan Mitra Netra menjadi karyawan Telesales ANZ/ <i>The program supports the visually impaired through the Mitra Netra Foundation where some members are engaged to become the Telesales employee of ANZ.</i>
Program Ayo Ke Bank/ The Ayo Ke Bank (Come to the Bank) Program	April 2013	IDR 20,000,000	Menjalankan program Ayo ke Bank di beberapa cabang ANZ di Indonesia yang ditujukan kepada anak karyawan ANZ serta anak dari para nasabah Signature Priority Banking untuk mengenal kegiatan perbankan seperti: bagaimana cara membuka rekening, kegunaan uang, dan lain-lain/ <i>Run the Ayo ke Bank program in several branches of ANZ across Indonesia, aimed at children of employees of ANZ and children of Signature Priority Banking customers to know banking activities such as: how to open an account, the introduction to money, etc.</i>
Program Tanggap Bencana/ Disaster Relief Program	April 2013	IDR 30,000,000	Donasi biaya peralatan sekolah untuk SD Karet Tengsin 01 yang terkena dampak bencana banjir pada bulan Januari 2014/ <i>Donate the fund for school supplies for elementary school Karet Tengsin 01 affected by flood in January 2014.</i>
Program Dana Pendidikan/ Education Fund Program	January - December 2013	IDR 55,000,000	Donasi biaya pendidikan untuk 1 murid di SMA Sampoerna Academy untuk 3 tahun/ <i>Donate the cost of education for one student in high school Sampoerna Academy for 3 years.</i>
Program Dana Pendidikan/ Education Fund Program	January - December 2013	IDR 96,000,000	Donasi biaya pendidikan untuk 12 anak (tiap tahunnya) di The Learning Farm/ <i>Donate the cost of education for 12 children (each year) from The Learning Farm.</i>
Program MoneyMinded – Melek Keuangan/ Money Minded Program – Financial Inclusion	January - December 2013	IDR 173,560,000	Bank juga akan terus mendukung program Bank Indonesia untuk mengedukasi masyarakat dalam hal finansial. Sejak tahun 2012, ANZ telah meluncurkan program MoneyMinded dan pelatihan melek keuangan ini telah dilakukan kepada lebih dari 500 peserta dari dua organisasi nirlaba di Indonesia serta staf ANZ. Program MoneyMinded ini juga merupakan program yang didukung oleh karyawan ANZ, dimana para karyawan menyumbangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk menjadi fasilitator program MoneyMinded/ <i>The Bank will also continue to support Bank Indonesia in educating the public through the financial education program. Since the year 2012, ANZ has launched MoneyMinded and financial literacy training that has been carried out to more than 500 participants from the 2 (two) non-profit organizations in Indonesia and also to the ANZ staffs. MoneyMinded program is also a program that is supported by ANZ employees, where employees contribute their time, energy and thought to be the MoneyMinded program's facilitator.</i>
Program Rumah Belajar/ Learning House Program	March 2013	IDR 122,539,450	Rumah Belajar didirikan di parkir ANZ Tower pada bulan Maret 2013. Program ANZ Rumah Belajar, dimana ANZ bekerjasama dengan Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB) dalam memberikan pelatihan komputer dan Bahasa Inggris kepada masyarakat setempat. Sampai akhir tahun 2013, lebih dari 100 anak sudah mendapatkan manfaat dari Rumah Belajar/ <i>The house was set up in the ANZ Tower parking area in March 2013. The ANZ House of Learning and Development program is made in collaboration with Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB) by providing computer and English training to the local community. Until the end of 2013, more than 100 children are already benefiting from the program</i>
TOTAL		IDR 497,099,450 dan USD 200,000	

### III. AKUNTABILITAS ACCOUNTABILITY

Untuk menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas ini, diperlukan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban masing-masing komponen dalam Bank, sehingga pengelolaan Bank dapat terlaksana secara efektif.

Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ Bank yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi Bank dan menetapkan kompetensi kepada organ tersebut sesuai tanggung jawab masing-masing, melalui keberadaan struktur organisasi yang memadai.

Selain adanya aspek akuntabilitas dalam struktur dan mekanisme pelaporan, Bank juga menerapkan akuntabilitas dalam penyampaian laporan keuangan serta penanganan karyawan/SDM.

Aspek akuntabilitas dalam penyampaian laporan keuangan, diwujudkan dengan keberadaan Rapat Umum Pemegang Saham, sebagai sarana bagi Dewan Direksi Bank untuk mempertanggungjawabkan kinerja Bank yang tercermin dalam laporan keuangan Bank. Selain itu, Bank juga menyampaikan laporan keuangan publikasi untuk masyarakat luas, dalam surat kabar nasional setiap tiga bulan sekali.

Aspek akuntabilitas dalam penanganan karyawan/SDM dicerminkan melalui penerapan sistem *reward and punishment*, yang dikaitkan dengan kebijakan kompensasi.

*In order to uphold the principle of accountability, the clarity of function and execution and responsibility of each component in the Bank is necessary, so that the Bank can be managed effectively.*

*The Bank has defined clear responsibilities from every parts of the Bank in accordance to vision, mission, target market and Bank's strategy and also has defined the competency of those parts according to each responsibility, through the existence of a robust organization structure.*

*In addition to the existence of accountability aspect in the reporting structure and mechanism, the Bank has also implemented accountability in delivering financial report and human resource handling.*

*The accountability aspect in delivering financial report is reflected in the existence of the General Meeting of Shareholders, as a tool for Board of Directors of the Bank to be responsible for Bank's performance as reflected in the Bank's financial report. Moreover, the Bank also publishes a public financial report in a national newspaper once in three months.*

*The accountability aspect in employee/ human resource handling is reflected in the implementation of reward and punishment system in line with the employee compensation policy.*



Selain adanya aspek akuntabilitas dalam struktur dan mekanisme pelaporan, Bank juga menerapkan akuntabilitas dalam penyampaian laporan keuangan serta penanganan karyawan/SDM.

*In addition to the existence of accountability aspect in the reporting structure and mechanism, the Bank has also implemented accountability in delivering financial report and human resource handling.*

## IV. PERTANGGUNGJAWABAN RESPONSIBILITY

Pengelolaan Bank didasarkan pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank telah memberikan pedoman yang tegas berupa kebijakan umum dalam Peraturan Perusahaan bahwa Bank dan karyawan harus mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang Indonesia dan segala perubahan terhadap undang-undang tersebut setiap saat. Bank juga menciptakan iklim dan budaya kepatuhan dalam kegiatan operasionalnya.

Bank dikelola dengan mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat dan prinsip kehati-hatian. Transaksi masyarakat dengan Bank mencerminkan kepercayaan publik terhadap Bank dan Bank menjaga kepercayaan tersebut dengan penuh tanggung jawab melalui pengelolaan Bank yang sehat, *prudent* dan profesional. Tingkat kesehatan Bank merupakan salah satu aspek yang menjadi perhatian Dewan Direksi dimana hal tersebut secara berkala diukur setiap triwulan. Saat ini tingkat kesehatan Bank berada pada peringkat sehat.

*The Bank's management is fully committed to complying with the prevailing regulations. The Bank has created a clear guideline in a form of Company's Regulation that the Bank and its employees have to comply with all regulations in Indonesia and all amendments thereto. The Bank also continuously strive to create a compliance culture and environment which supports that culture in its operational activities.*

*The Bank is managed by prioritizing professional management and prudential principles above all else. Transactions made by all people in the Bank must reflect the trust given by public to the Bank and the Bank must keep that trust by being responsible by upholding prudential principles and professional management. The Bank's soundness rating is one of aspects that have been a focus of the Bank's Directors which is assessed regularly on a quarterly basis. The Bank's soundness rating is considered sound.*





## V. INDEPENDENSI INDEPENDENCY

Manajemen Bank menyadari status hukum Bank sebagai entitas hukum berupa perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, oleh karenanya harus menjaga independensi dalam melaksanakan tugas sehari-hari, termasuk dari pengaruh pemegang saham.

Dalam hal perkreditan, Bank telah memiliki fungsi manajemen risiko kredit dengan prosedur tata kelola yang berjalan dengan baik, termasuk unit manajemen risiko kredit, kebijakan dan prosedur, penetapan limit, pemantauan risiko kredit, audit terhadap perkreditan, serta pelaporan kredit kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris.

Dalam hal pemutusan kredit, manajemen telah membentuk Komite Kredit yang berfungsi untuk mengevaluasi dan menyetujui keputusan kredit dalam jumlah besar yang jumlahnya di atas batas pemegang diskresi kredit (*credit authority discretion*) perorangan.

Pengawasan risiko kredit dilakukan oleh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris masing-masing melalui organ Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantauan Risiko dimana Bank juga telah memiliki sistem informasi yang baik untuk pengukuran, pengawasan dan pelaporan risiko kredit. Risiko kredit diidentifikasi dan dikendalikan salah satunya melalui deteksi secara dini atas kualitas kredit debitur pada semua lini bisnis Bank.

Proses perkreditan telah mencakup pemisahan tugas dan tanggung jawab untuk mencegah adanya kecurangan. Proses perkreditan juga termasuk salah satu area yang diperiksa oleh SKAI dengan setiap temuan audit ditindaklanjuti dan tindakan perbaikan (*corrective action*) dimonitor dengan ketat.

*The Bank's Management realizes the legal status of the Bank as a limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia. Therefore, it must maintain independence in carrying out daily tasks, including from the influence of shareholders.*

*In terms of lending, the Bank has a credit risk management function with governance procedures that work well, including credit risk management unit, policies and procedures, limits, credit risk monitoring, audit of credit, and credit reporting to the Board of Directors and Board of Commissioners.*

*For credit approval process, the management has established a Credit Committee which serves to evaluate and approve credit in a large amount exceeding the discretion of the the individual credit authority holder.*

*Credit risk oversight is conducted by the Board of Directors and Board of Commissioners through the Risk Management Committee and the Risk Monitoring Committee, respectively, in which the Bank has a robust information system for measurement, monitoring and reporting of credit risk. Credit risks are identified and controlled through the early detection of credit quality of debtor in all of the Bank's business lines.*

*Lending process has included separation of duties and responsibilities to prevent any fraud. Lending process is also one of areas examined by the Internal Audit Unit where each audit finding is followed up and its corrective action also closely monitored.*

Bank menyadari masih adanya ketergantungan dalam hal teknologi kepada ANZ Group, terutama dalam kaitannya dengan fakta bahwa pusat data (*data center*) dan pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) Bank dikelola di pusat data (*data center*) dan pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) milik ANZ Group di Melbourne, Australia. Bank telah memperoleh persetujuan ulang dari Bank Indonesia untuk pusat data (*data center*) dan pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) yang berlokasi di Melbourne, Australia tersebut pada 19 Maret 2010. Namun demikian, dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2013 yang antara lain mewajibkan lokasi pusat data (*data center*) dan pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) untuk berada di dalam negeri, maka saat ini Bank bekerja sama dengan ANZ Group untuk relokasi pusat data (*data center*) dan pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) dari lokasi di Melbourne, Australia ke lokasi di Indonesia. Bank telah mempresentasikan rencana relokasi tersebut kepada Bank Indonesia.

Sehubungan dengan lokasi pusat data (*data center*) dan pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) Bank di lokasi milik ANZ Group di Melbourne, Australia tersebut, maka Bank dibebankan *intra-group charges* oleh ANZ Group. Pada 24 Oktober 2011, Bank Indonesia telah meminta Bank untuk menghentikan pencatatan dan pembayaran atas pembebanan *intra-group charges* tersebut untuk tahun 2011 dan periode berikutnya jika tidak disertai dengan dokumen pendukung dan/atau rincian kontrak atas pembebanan biaya dimaksud dan Bank mematuhiinya. Bank telah membentuk *Steering Committee* untuk membahas pembebanan *intra-group charges* termasuk penelaahan atas kelengkapan dokumen pendukung serta negosiasi atas biaya yang timbul.

Relokasi pusat data (*data center*) dan pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) dari luar negeri ke Indonesia merupakan bagian dari *Technology Roadmap* yang saat ini masih dalam proses implementasi oleh Bank. Hal lain yang tercakup dalam *Technology Roadmap* adalah penambahan sumber daya manusia (SDM) ataupun tenaga ahli Teknologi Informasi serta sertifikasi tenaga ahli Teknologi Informasi Bank, yang ditujukan untuk meningkatkan independensi Bank dalam teknologi informasi.

*The Bank is aware of the dependency in technology to ANZ Group, particularly in relation to the fact that the data center and disaster recovery center of the Bank is managed in a data center and disaster recovery center owned by ANZ Group in Melbourne, Australia. The Bank has obtained re-approval from Bank Indonesia for the data center and disaster recovery center located in Melbourne, Australia on March 19, 2010. However, with the issuance of Government Regulation No. 82 of 2013 which among others things requires that the data center and the disaster recovery center to be located in an onshore site, The Bank is currently working with ANZ Group for the relocation of the data center and the disaster recovery center currently located in Melbourne, Australia to locations in Indonesia. The Bank has presented the relocation plan to Bank Indonesia.*

*With respect to the location of the Bank's data center and disaster recovery center in the location owned and managed by ANZ Group in Melbourne, Australia, the Bank is charged with intra-group charges by ANZ Group. On October 24, 2011, Bank Indonesia has requested the Bank to stop booking and making payment on intra-group charges for the year 2011 and the following periods if they are not supported with complete documents and/or detailed agreement on those charges and the Bank has complied with this requirement. The Bank has established a Steering Committee to discuss intra-group charges including a review on the supporting documents as well as discussion on the costs incurred.*

*Relocation of the data center and the disaster recovery center from offshore location to Indonesia is part of the Technology Roadmap, which is still in the process of implementation by the Bank. Other matters included in the Technology Roadmap is the addition of technology human resources (HR) or Information Technology experts and certified banking Information Technology experts, aimed at increasing the independence of the Bank in the information technology area.*



Relokasi pusat data (data center) dan pusat pemulihan bencana (disaster recovery center) dari luar negeri ke Indonesia merupakan bagian dari *Technology Roadmap* yang saat ini masih dalam proses implementasi oleh Bank.

*Relocation of the data center and the disaster recovery center from offshore location to Indonesia is part of the Technology Roadmap, which is still in the process of implementation by the Bank.*

## VI. KEWAJARAN FAIRNESS

Operasional Bank didasarkan pada prinsip kewajaran dengan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bank memenuhi hak-hak nasabah sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh Bank dan nasabah ketika melakukan transaksi. Bank juga melindungi kepentingan nasabah sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh pemerintah, termasuk dalam hal kerahasiaan nasabah, penyelesaian pengaduan, transparansi informasi produk Bank, informasi debitur, pelaksanaan prinsip mengenal nasabah dan lain-lain.

Karyawan merupakan salah satu aset terpenting bank dalam memberikan produk dan layanan kepada nasabah, oleh karena itu Bank berkomitmen untuk mengembangkan karyawan agar handal dan mencapai kualitas terbaiknya. Hak dan kewajiban karyawan telah digariskan dalam Peraturan Perusahaan dan surat pengangkatan karyawan. Bank memastikan bahwa hak dan kewajiban tersebut dapat terwujud dengan proporsional dan profesional.

Pemegang saham, disamping nasabah, adalah pertimbangan dan perhatian utama Bank dalam operasionalnya. Bank mengandalkan usaha bersama antara seluruh karyawan dan manajemen untuk selalu memberikan tingkat layanan yang unggul secara konsisten kepada nasabah, dengan demikian memungkinkan pertumbuhan bisnis yang baik dan menguntungkan untuk memberikan keuntungan finansial yang tinggi secara konsisten kepada para pemegang saham.

*The Bank's operation is based upon the principle of fairness with justice and equality in fulfilling the rights of stakeholders appeared in accordance with commitment and prevailing regulations.*

*The Bank fulfills customers' rights according to agreement made between the Bank and customers when they do transaction. The Bank also protects customers' interest according to the stipulations defined by the government, including customer's secrecy, complaint settlement, Bank's product information transparency, debtor information, Know Your Customer principle implementation.*

*Employees are one of the most important assets of the Bank in providing products and services to customers. Therefore, Bank is committed to develop their employees to be at their best. The rights and obligations of employees have been defined in Company's Regulation and included in the employee appointment's letter. The Bank assures that those rights and obligations can be realized proportionally and professionally.*

*Shareholders, in addition to customers, are the Bank's primary focal point. The Bank relies on the cooperation between all employees and management to always give the best services to customers, so it is likely to have good and profitable business growth to enable continuous financial profit to all shareholders.*

## VII. HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BANK

### SELF ASSESSMENT RESULT ON THE BANK'S GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

Bank melakukan *self assessment* atas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan lampiran 3 Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tertanggal 30 Mei 2007 tentang Kertas Kerja *Self Assessment GCG* dengan rincian hasil sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini:

*The Bank conducted self assessment on its good corporate governance implementation based on appendix 3 Bank Indonesia Circular Letter No. 9/12/DPNP dated 30 May 2007 concerning Self Assessment Worksheet of GCG Implementation with result details as presented in the below table:*

#### RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT SELF ASSESSMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Per 31 Desember 2013

Aspek yang dinilai / Aspect being assessed	Bobot / Weight (a)	Peringkat / Rating (b)	Nilai / Score (a) x (b)	Catatan *) / Note *)
Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris <i>The Implementation of the Board of Commissioners' Duties and Responsibilities</i>	10.00%	1.33	0.133	
Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi <i>The Implementation of the Board of Directors' Duties and Responsibilities</i>	20.00%	1.18	0.237	
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite] <i>Completeness and Implementation of the Committee's Duties</i>	10.00%	1.22	0.122	
Penanganan Benturan Kepentingan <i>Handling Conflict of Interest</i>	10.00%	1.11	0.111	
Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank <i>The Implementation of the Bank's Compliance Function</i>	5.00%	1.02	0.051	
Penerapan Fungsi Audit Intern <i>The Implementation of Internal Audit Function</i>	5.00%	1.33	0.067	
Penerapan Fungsi Audit Ekstern <i>The Implementation of External Audit Function</i>	5.00%	1.00	0.050	
Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern <i>The Implementation of the Risk Management and Internal Control Functions</i>	7.50%	1.11	0.083	
Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait ( <i>Related Party</i> ) dan Debitur Besar ( <i>Large Exposures</i> ) <i>Provision of Funds to Related Parties and Large Exposures</i>	7.50%	1.56	0.117	
Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal <i>Transparency of the Bank's Financial and Non-Financial conditions, Implementation of GCG and Internal Reporting</i>	15.00%	1.00	0.150	
Rencana Strategis Bank <i>The Bank's Strategic Plan</i>	5.00%	1.03	0.052	
<b>Nilai Komposit</b> <i>Composite Rating</i>	<b>100.00%</b>		<b>1.172</b>	<b>Sangat Baik</b> <i>Very Good</i>

Mengacu pada penilaian komposit tersebut, Bank menilai pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam aktivitas Bank berada pada peringkat 1 (satu) dari 5 (lima), yaitu sangat baik. Penilaian ini ditentukan dengan memperhatikan fakta-fakta bahwa Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mengimplementasikan prinsip GCG, sekaligus mengakomodasi praktik-praktik yang mempromosikan penerapan fungsi manajemen risiko, dukungan atas kegiatan pengendalian internal, serta sistem pemantauan yang dilakukan oleh SKAI.

Walaupun begitu, Bank menyadari bahwa masih terdapat beberapa hal yang masih harus mendapatkan perhatian dan perbaikan dari keseluruhan praktik GCG yang telah diimplementasikan oleh Bank.

Hal-hal tersebut antara lain adalah penyediaan dana kepada pihak terkait atau konsentrasi penyediaan dana kepada satu pihak tertentu dan penyusunan rencana bisnis yang lebih akurat, realistis dan mempertimbangkan tidak hanya faktor-faktor internal yang mempengaruhi aktivitas bisnis Bank, melainkan juga faktor eksternal seperti misalnya kondisi pasar dan perekonomian global.

*Referring to the composite self assessment, the Bank achieved rating 1 (one) out of 5 (five) which is very good. The result of this assessment is attributed to the fact that the Bank has an adequate organization structure to implement GCG principles, and accommodate any practices that promote risk management function implementation, support internal control activities, and also monitor the system, which is performed by the Internal Audit.*

*The Bank's management also realized that there is still room for improvement in the Bank's GCG practices and the Bank will strive to continuously improve.*

*Some of the matters that the Bank will focus on are business plan arrangement that is more accurate, realistic and taking into account internal factors that influence Bank's business activity as well as the external factors such as market condition and the global economy.*

Bank sejauh ini telah meletakkan dasar yang kokoh untuk pelaksanaan GCG, dengan memenuhi semua ketentuan yang digariskan oleh Bank Indonesia, yang turut dibuktikan dengan keberadaan hasil *self-assessment* atas pelaksanaan GCG yang cukup memuaskan. Kedua hal tersebut menunjukkan komitmen Bank dalam melaksanakan prinsip-prinsip dan ketentuan GCG.

Bank menyadari bahwa pelaksanaan GCG tidak hanya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, namun lebih dari itu, juga untuk menunjang operasional Bank dalam mencapai tujuan bisnisnya untuk menghasilkan yang terbaik bagi nasabah, karyawan, regulator, masyarakat dimana Bank beroperasi dan pemegang saham.

Untuk selanjutnya, Bank akan terus meningkatkan pelaksanaan GCG yang telah berjalan selama ini dengan fokus pada peningkatan keterlibatan anggota Dewan Komisaris dan anggota-anggota Komite yang berada di bawah Dewan Komisaris, peningkatan tingkat pengawasan Direksi yang dilakukan melalui fungsi-fungsi Kepatuhan, Audit Internal, dan Manajemen Risiko, serta pengendalian internal.

*Thus, the Bank has placed a strong foundation to implement GCG by fulfilling all regulations set by Bank Indonesia, as evidenced by the existence of self-assessment results that is on target and satisfactory. This proves the Bank's commitment in implementing all principles and stipulations of GCG.*

*The Bank realizes that the GCG implementation is not only to fulfill stipulated regulations, but also to support operations in reaching its business goals of obtaining best results for all customers, employees, regulator and the people where bank operates, as well as its shareholders.*

*Furthermore, the Bank will endeavor to improve the implementation of GCG which has been performed by focusing on leveraging the involvement of the members of the Board of Commissioners and Committee and optimizing the supervision performed by the Board of Directors through Compliance, Internal Audit, Risk Management, and also internal control functions.*

Dengan Hormat,  
*Regards,*



**Enrique V. Bernardo**

Presiden Komisaris / President Commissioner



**Joseph Abraham**

Presiden Direktur / President Director



"Bank sejauh ini telah meletakkan dasar yang kokoh untuk pelaksanaan GCG, dengan memenuhi semua ketentuan yang digariskan oleh Bank Indonesia, yang turut dibuktikan dengan keberadaan hasil *self-assessment* atas pelaksanaan GCG yang cukup memuaskan. Kedua hal tersebut menunjukkan komitmen Bank dalam melaksanakan prinsip-prinsip dan ketentuan GCG."

*"Thus, the Bank has placed a strong foundation in implementing GCG, by fulfilling all regulations defined by Bank Indonesia, evidenced by the existence of self-assessment results that is on target and satisfactory. That has shown commitment of bank in implementing all principles and stipulations of GCG."*